



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA



LAPORAN KINERJA



**TRIWULAN III
2024**

PUSAT PELATIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Gedung Mina Bahari III
Jl. Medan Merdeka Timur
Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Tim Penyusun

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Dr.Lilly Aprilia Pregiwati,S.Pi,MSi | Pengarah |
| Dessi Arisandi, S.Pi, M.SE | Ketua |
| Redi Wibowo, A.Md | Anggota |
| Moh. Ismail Adiyaksa N, S.Si | Anggota |
| Sarly Assajdah, A.Md | Anggota |
| Redi Wibowo, A.Md | Anggota |
| Fitra Aditama,S.St.Pi | Anggota |
| Erlan Nurcahya Putra S.I.K | Anggota |

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Triwulan III Pusat Pelatihan KP dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di Pusat Pelatihan KP selama triwulan ketiga tahun 2024.

Selama triwulan III tahun 2024, Pusat Pelatihan KP telah melaksanakan berbagai kegiatan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2024 yang terdiri dari 9 sasaran strategis dan 27 Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam laporan kinerja ini dijabarkan mengenai target dan realisasi kinerja pada triwulan III tahun 2024, keberhasilan/kegagalan program, permasalahan dan solusi, serta kinerja lainnya yang telah dicapai oleh Pusat Pelatihan KP.

Selanjutnya laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara utuh atas capaian kinerja pada bidang pelatihan kelautan dan perikanan dan dukungan manajemen pelaksanaan tugas lainnya selama triwulan III pada tahun 2024.

Akhir kata, semoga penyajian Laporan Kinerja Triwulan III Pusat Pelatihan KP Tahun 2024 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja kami kepada masyarakat atas mandat yang diemban oleh Pusat Pelatihan KP, dan sebagai bahan evaluasi kinerja organisasi dan umpan balik untuk terus meningkatkan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan dan koordinasi pelaksanaannya.

Jakarta, 18 Oktober 2024

Plt. Kepala Pusat Pelatihan KP,



Dr. Lilly Aprilya Pregiwati, S.Pi, M.Si

RINGKASAN EKSEKUTIF

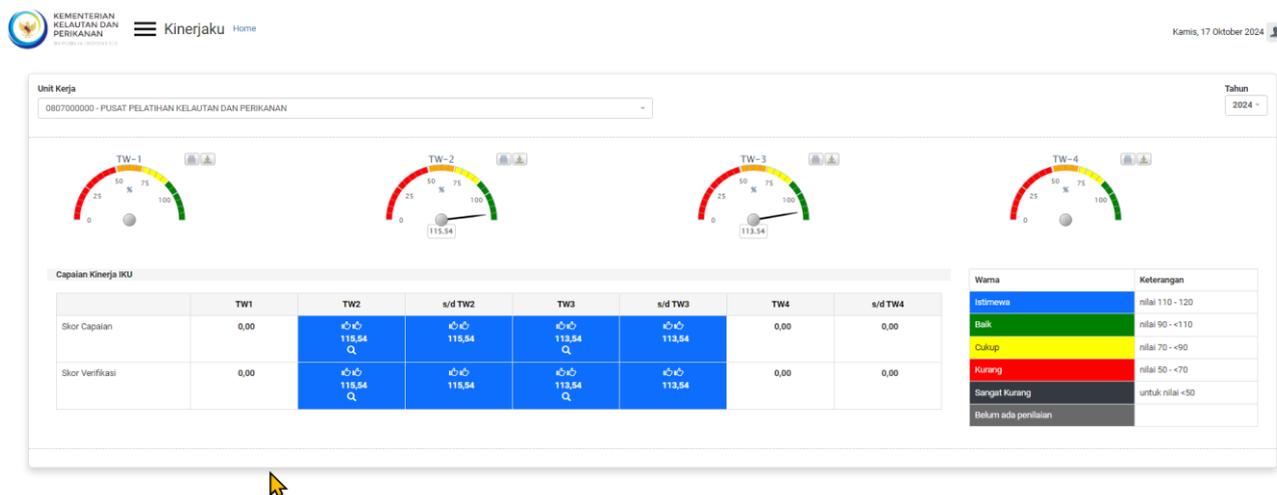
Penyusunan laporan kinerja mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* Atas Laporan Kinerja.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran tentang keberhasilan maupun kegagalan kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pusat Pelatihan KP tahun 2024. Perjanjian Kinerja tersebut, merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) Pusat Pelatihan KP tahun 2020-2024, dan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), dimana akuntabilitas adalah sebagai salah satu wujud komitmen Pusat Pelatihan KP dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran dan pengendalian sumberdaya dalam penyelenggaraan pelatihan pada akhir periode pengukuran

Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan berdasarkan PK April Tahun 2024 mempunyai target tahunan untuk persentase lulusan pelatihan yang terserap di dunia usaha dan dunia industri sebesar 72%, pelatihan sebanyak 35.173 orang masyarakat yang dilatih, nilai PNBPN satker lingkup Pusat Pelatihan KP sebesar 13.416 M, 122 tenaga kerja yang terlibat di lingkup Pusat Pelatihan KP, 1.450 orang SDM KP yang bersertifikat kompetensi, lulusan pelatihan yang membentuk start up sebanyak 147 orang, 5 paket materi pelatihan berbasis Kaji Widya, 4 NSPK, 7 lembaga pelatihan tersertifikasi sesuai standar lembaga pelatihan, 75% usulan sertifikasi program diklat masyarakat bidang kelautan dan perikanan yang disahkan sesuai peraturan yang berlaku, 12 jejaring dan/atau kerjasama lingkup Pusat Pelatihan KP yang disepakati dan ditindak lanjuti, 6 sarana pelatihan KP yang disepakati dan ditindaklanjuti, 5 prasarana pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya, pelatihan aparatur KP 5.165 orang, 1 akreditasi lembaga penyelenggara diklat aparatur, 10% partisipasi unit organisasi dalam rangka implementasi *corpu* di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, 5 lembaga/instansi yang memanfaatkan fungsi pelayanan Peningkatan Kompetensi ASN Kelautan dan Perikanan dan IKU dukungan manajemen antara lain persentase layanan dukungan manajemen, unit kerja yang lolos penilaian WBK, nilai rekonsiliasi kinerja, persentase unit kerja yang menerapkan MP terstandar, indeks profesionalitas ASN Pusat Pelatihan KP, batas tertinggi nilai temuan laporan hasil temuan BPK-RI atas LK Pusat Pelatihan KP, persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Pusat Pelatihan KP, inovasi pelayanan publik

yang diterapkan pada unit kerja Pusat Pelatihan KP, dan penilaian mandiri SAKIP Pusat Pelatihan KP.

Pengukuran capaian kinerja Pusat Pelatihan KP Triwulan III Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi IKU (*key performance indicator*, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balanced scorecard* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu Aplikasi Kinerjaku yang dapat diakses secara daring pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Capaian nilai kinerja organisasi Pusat Pelatihan KP pada triwulan III tahun 2024 adalah **113,54% - ISTIMEWA** seperti pada tampilan grafik dashboard dibawah ini :



Gambar 1. Screenshot Nilai NKO Aplikasi Kinerjaku Pusat Pelatihan KP Triwulan III

Capaian Penetapan Kinerja Pusat Pelatihan KP Tahun 2024 dengan sasaran strategis yaitu terwujudnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan dan tersedianya lulusan pelatihan kelautan dan perikanan sesuai standar kompetensi dan kebutuhan. Capaian kinerja Pusat Pelatihan KP pada Triwulan III ini adalah:

1. Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih dengan target triwulan III sebanyak 28.834 orang dan capaian sebesar 35.148 orang (120%);
2. Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Pelatihan KP dengan target triwulan III sebanyak Rp8,99 Milyar dan capaian sebesar Rp17,68 Milyar (120%);
3. SDM KP yang bersertifikat kompetensi dengan target triwulan III sebanyak 853 orang dan capaian sebesar 1.299 orang (120%);
4. Jejaring dan/atau kerjasama lingkup Pusat Pelatihan KP yang disepakati dan ditindaklanjuti dengan target triwulan III sebanyak 10 kerjasama dan capaian 10 kerjasama (100%);

5. Aparatur KP yang dilatih dengan target triwulan III sebanyak 4.300 orang dan capaian sebesar 5.120 orang (119,07%);
6. Persentase layanan dukungan manajemen internal Pusat Pelatihan KP dengan target triwulan III sebanyak 75% dan capaian sebesar 78,33% (104,44%);
7. Persentase unit kerja Pusat Pelatihan KP yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar dengan target triwulan III sebesar 94% dan capaian sebesar 118,19% (120%);
8. Persentase rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan Pusat Pelatihan KP dengan target 82% dan capaian 82% (100%).

Dari sisi anggaran, Pusat Pelatihan KP dan UPT Pusat Pelatihan KP memiliki Pagu awal sebesar Rp. 431.422.576.000 dan pagu yang aktif sebesar Rp. 416.988.460.000. Berdasarkan data, sampai dengan Triwulan III Tahun 2024, realisasi keuangan Pusat Pelatihan KP dan UPT sebesar Rp. 297.111.541.836 atau sebesar 71,25% dari Pagu Aktif. Untuk Pusat Pelatihan KP sendiri memiliki pagu awal sebesar Rp.15.351.302.000 dan pagu aktif sebesar Rp. 13.301.302.000. Realisasi anggaran Pusat Pelatihan KP sebesar Rp. 9.736.860.166 yakni 73,20 % dari Pagu Aktif Pusat Pelatihan KP.

Dalam pelaksanaan kegiatan pada triwulan III tahun 2024 capaian kinerja *output* program sudah semuanya tercapai, namun demikian untuk menghasilkan kualitas hasil kinerja yang optimal dimasa-masa mendatang dalam penyelenggaraan program perlu melakukan berbagai hal sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap indikator kinerja Pusat Pelatihan KP dengan Satker lingkup Pusat Pelatihan KP secara kontinu;
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kegiatan yang menjadi prioritas KKP dan Nasional.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| Kata Pengantar | i |
| Ringkasan Eksekutif..... | ii |
| Daftar Isi | v |
| Daftar Tabel | vi |
| Daftar Gambar | vii |
| Bab I - Pendahuluan | 2 |
| Latar Belakang | 2 |
| Maksud dan Tujuan..... | 2 |
| Tugas dan Fungsi | 3 |
| Keragaan SDM..... | 4 |
| Potensi dan Permasalahan | 7 |
| Sistematika Penulisan..... | 9 |
| Bab II - Perencanaan Kinerja | 11 |
| Rencana Strategis 2020-2024 | 11 |
| Program Utama Kegiatan Prioritas Presiden | 11 |
| Tujuan | 12 |
| Sasaran Kegiatan..... | 12 |
| Rencana Kerja Tahun 2024 | 16 |
| Perjanjian Kinerja Tahun 2024..... | 17 |
| Pengukuran Kinerja..... | 19 |
| Bab III - Akuntabilitas Kinerja | 23 |
| Prestasi Kinerja Pusat Pelatihan KP | 23 |
| Evaluasi dan Analisis Kinerja | 23 |
| Akuntabilitas Keuangan | 60 |
| Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumber Daya Pusat Pelatihan KP | 63 |
| Bab IV - Penutup | 67 |
| Capaian Kinerja Utama | 67 |
| Permasalahan dan Rekomendasi..... | 70 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1. Distribusi Pegawai Pusat Pelatihan KP berdasarkan Jenis Kelamin Triwulan III 2024 | 5 |
| Tabel 2. Distribusi Pegawai Pusat Pelatihan KP Berdasarkan Golongan/Ruang Triwulan III 2024 | 5 |
| Tabel 3. Distribusi Pegawai Pusat Pelatihan KP Berdasarkan Pendidikan Terakhir Triwulan III 2024 | 5 |
| Tabel 4. Distribusi Pegawai Pusat Pelatihan KP Berdasarkan Kelompok Jabatan Triwulan III 2024 | 5 |
| Tabel 5. Distribusi JF Tertentu Pegawai Pusat Pelatihan KP Per September Tahun 2024..... | 5 |
| Tabel 6. Wilayah Pelatihan UPT Pelatihan KP..... | 6 |
| Tabel 7. Rencana Kerja dan Anggaran TA 2024 | 16 |
| Tabel 8. Perjanjian Kinerja Pusat Pelatihan KP Tahun 2024 | 17 |
| Tabel 9. Indeks Capaian IKU..... | 21 |
| Tabel 10. Capaian Kinerja Triwulan III tahun 2024 pada Pusat Pelatihan KP | 24 |
| Tabel 11. Capaian IKU Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih..... | 27 |
| Tabel 12. Rekap Masyarakat KP yang Dilatih menurut Satker | 28 |
| Tabel 13. Masyarakat KP yang Dilatih Per Jenis Pelatihan | 28 |
| Tabel 14. Capaian IKU Nilai PNBSP Satker Lingkup Pusat Pelatihan KP | 30 |
| Tabel 15. Rekap IKU Nilai PNBSP Satker Lingkup Pusat Pelatihan KP | 30 |
| Tabel 16. Capaian IKU SDM KP yang bersertifikat kompetensi | 33 |
| Tabel 17. Rekap Sertifikasi Kompetensi per Satker | 33 |
| Tabel 18. Rekap IKU SDM KP yang bersertifikat kompetensi perbidang usaha | 34 |
| Tabel 19. Capaian IKU Jejaring dan/atau kerjasama lingkup Pusat Pelatihan KP yang disepakati dan ditindaklanjuti..... | 40 |
| Tabel 20. Rekap Capaian IKU Jejaring dan/atau kerjasama lingkup Pusat Pelatihan KP..... | 41 |
| Tabel 21. Capaian IKU Aparatur KP yang dilatih | 44 |
| Tabel 22. Capaian IKU Persentase layanan dukungan manajemen internal Pusat Pelatihan KP | 47 |
| Tabel 23. Rekap Dokumen Dukungan Manajemen Internal Pusat Pelatihan KP | 47 |
| Tabel 24. Capaian IKU Persentase unit kerja Puslat KP yang menerapkan manajemen pengetahuan yang tersandar | 52 |
| Tabel 25. Bobot Komponen Kualifikasi Perhitungan MP..... | 53 |
| Tabel 26. Bobot Komponen Kompetensi Perhitungan MP | 54 |
| Tabel 27. Bobot Komponen Kinerja Perhitungan MP..... | 54 |
| Tabel 28. Bobot Komponen Disiplin Perhitungan MP | 54 |
| Tabel 29. Kategori Nilai IP ASN | 55 |
| Tabel 30. Capaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan..... | 57 |
| Tabel 31. Perbandingan Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan (%) dengan Eselon II Lainnya | 57 |
| Tabel 32. Realisasi Keuangan Lingkup Pusat Pelatihan KP | 60 |
| Tabel 33. Rincian Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Utama dan Pendukung IK Triwulan III Tahun 2024..... | 61 |
| Tabel 35. Link Data Dukung Capaian IK | 76 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|-----|
| Gambar 1. Screenshot Nilai NKO Aplikasi Kinerjaku Pusat Pelatihan KP Triwulan II | iii |
| Gambar 2. Struktur Organisasi Puslat KP berdasarkan PermenKP No. 5 Tahun 2024 | 4 |
| Gambar 3. Wilayah Kerja Balai Pelatihan | 7 |
| Gambar 4. Tampilan Kinerjaku | 23 |
| Gambar 5. Formula perhitungan MP (Sumber : Dok Manual IKU) | 52 |
| Gambar 6. Rumus Perhitungan IP ASN (Sumber : Manual IKU) | 55 |



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA



pendahuluan

BAB I - PENDAHULUAN

Latar Belakang

Salah satu prinsip dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah akuntabilitas, dimana akuntabilitas adalah sebagai salah satu wujud komitmen Pusat Pelatihan KP dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran dan pengendalian sumberdaya dalam penyelenggaraan pelatihan pada akhir periode pengukuran. Penyelenggaraan kegiatan tersebut, harus dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai pemegang kedaulatan negara sebagaimana diamanatkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Laporan Kinerja Pusat Pelatihan KP triwulan III Tahun 2024 merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap performa kinerja yang dicapai Pusat Pelatihan KP serta sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Pusat Pelatihan KP guna memperbaiki kinerjanya di masa mendatang. Adapun dasar hukum dari pembuatan laporan kinerja ini antara lain :

- a. PP Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja INstansi Pemerintah
- b. Perpres Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- c. Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2024 Tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- d. Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- e. Permen KP Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan kinerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
- f. Perpres Nomor 38 tahun 2023 Tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan
- g. Permen KP Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan
- h. Kepmen KP 205 tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024

Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Pusat Pelatihan KP Triwulan III Tahun 2024 adalah:

- a. Sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis Pusat Pelatihan KP kepada Kepala BPPSDM KP selaku Pemberi Mandat, atas pencapaian kinerja Pusat Pelatihan KP pada Tahun 2024;
- b. Memberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelaksanaan kegiatan pelatihan KP dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Pusat Pelatihan KP.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Pusat Pelatihan KP Triwulan III Tahun 2024 adalah:

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Kepala BPPSDM KP selaku pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Pusat Pelatihan KP;
- b. Sebagai umpan balik dalam upaya perbaikan berkesinambungan bagi peningkatan kinerja Pusat Pelatihan KP.

Tugas dan Fungsi

- a. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2024, BPPSDM merupakan eselon I yang bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, BPPSDM didukung oleh unit kerja eselon II terdiri dari Sekretariat BPPSDM, Pusat Penyuluhan, Pusat Pelatihan dan Pusat Pendidikan. **Pusat Pelatihan KP mempunyai tugas menyelenggarakan pelatihan kelautan dan perikanan.**

- b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Pusat Pelatihan KP menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penyelenggaraan pelatihan masyarakat dan pegawai aparatur sipil negara kelautan dan perikanan;
- 2) Pelaksanaan tata kelola penyelenggaraan pelatihan masyarakat dan pegawai aparatur sipil negara kelautan dan perikanan;
- 3) Pelaksanaan pelatihan masyarakat dan pegawai aparatur sipil negara kelautan dan perikanan;
- 4) Pelaksanaan penjaminan mutu pelatihan masyarakat dan pegawai aparatur sipil negara kelautan dan perikanan;
- 5) Pelaksanaan sertifikasi kompetensi masyarakat dan pegawai aparatur sipil negara kelautan dan perikanan;

- 6) Pelaksanaan sertifikasi profesi masyarakat dan pegawai aparatur sipil negara kelautan dan perikanan;
 - 7) Pelaksanaan pengembangan kemitraan pelatihan masyarakat dan pegawai aparatur sipil negara kelautan dan perikanan;
 - 8) Pelaksanaan peningkatan serapan lulusan pelatihan masyarakat kelautan dan perikanan;
 - 9) Pengelolaan lulusan pelatihan masyarakat dan pegawai aparatur sipil negara kelautan dan perikanan;
 - 10) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pelatihan masyarakat dan pegawai aparatur sipil negara kelautan dan perikanan; dan
 - 11) Pelaksanaan urusan administrasi Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan.
- c. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, susunan organisasi Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.



Gambar 2. Struktur Organisasi Pusat Pelatihan KP berdasarkan PermenKP No. 5 Tahun 2024

Keragaan SDM

Pada triwulan II tahun 2024, setelah turunnya Perpres Nomor 38 tahun 2023 Tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Permen KP Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan mengalami perubahan SOTK menjadi Pusat

Pelatihan Kelautan dan Perikanan dan Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan. Perubahan SOTK ini disusul dengan perubahan komposisi pegawai di triwulan II. Adapun komposisi pegawai Pusat Pelatihan KP di Triwulan III 2024 yakni :

Tabel 1. Distribusi Pegawai Pusat Pelatihan KP berdasarkan Jenis Kelamin Triwulan III 2024

| CPNS & PNS | | Jumlah | % | | PPPK | | Jumlah | TOTAL |
|------------|----|--------|----|----|------|---|--------|-------|
| L | P | | L | P | L | P | | |
| 29 | 19 | 50 | 60 | 40 | 2 | 0 | 2 | 50 |

Tabel 2. Distribusi Pegawai Pusat Pelatihan KP Berdasarkan Golongan/Ruang Triwulan III 2024

| Golongan/ Ruang | | | | Jumlah | PPPK | TOTAL |
|-----------------|----|-----|----|--------|------|-------|
| I | II | III | IV | | | |
| | 4 | 29 | 15 | 48 | 2 | 50 |

Tabel 3. Distribusi Pegawai Pusat Pelatihan KP Berdasarkan Pendidikan Terakhir Triwulan III 2024

| Pendidikan CPNS dan PNS | | | | | | Pendidikan PPPK | | | Jumlah | TOTAL | |
|-------------------------|------|------|-------|----|----|-----------------|----|----|--------|-------|-------------|
| SD | SLTP | SLTA | DI/D2 | D3 | D4 | S1 | S2 | S3 | | | S2/S1/D4/D3 |
| | | 6 | | 4 | 2 | 17 | 20 | 1 | 48 | 2 | 50 |

Tabel 4. Distribusi Pegawai Pusat Pelatihan KP Berdasarkan Kelompok Jabatan Triwulan III 2024

| Jabatan | | | | | | | | | | Jumlah | PPPK |
|------------|-------------|-------------|----------|----------|---------|---------|---|-------------|---------|--------|------|
| eselon I.a | eselon II.a | eselon II.b | Es III.a | Es III.b | Es IV.a | Es IV.b | V | JF Tertentu | JF Umum | | |
| | 1 | | | | | | | 29 | 18 | 50 | 2 |

Tabel 5. Distribusi JF Tertentu Pegawai Pusat Pelatihan KP Per September Tahun 2024

| Nama Jabatan Fungsional | Jumlah |
|---|--------|
| Arsiparis | 2 |
| Pranata Komputer | 3 |
| Analisis Kebijakan | 5 |
| Analisis Hukum | 1 |
| Perencanaan | 11 |
| Analisis Pengelolaan Keuangan APBN | 4 |
| Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara | 2 |
| Pengembang Teknologi Pembelajaran | 1 |
| Total | 29 |

Dalam menjalankan tugas serta fungsinya, Pusat Pelatihan KP dibantu oleh 6 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelatihan, yaitu Balai Diklat Aparatur (BDA) Sukamandi, Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan (BPPP) Medan-Sumatera Utara, BPPP Tegal-Jawa Tengah, BPPP Banyuwangi-Jawa Timur, BPPP Bitung-Sulawesi Utara, dan BPPP Ambon-Maluku.

Kebijakan Kepala Pusat Pelatihan KP berkaitan dengan strategi pengembangan SDM kelautan dan perikanan melalui pelatihan dan adalah:

- 1) Untuk pelatihan bagi Aparatur, mengutamakan diklat mandatory, yaitu diklat prajabatan dan diklat bagi calon tenaga fungsional;
- 2) Memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pegawai KKP untuk

- mendapatkan diklat;
- 3) Mendorong adanya pengembangan jenis dan metode pelatihan;
 - 4) Mengupayakan perencanaan pelatihan sesuai dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan;
 - 5) Membuat kebijakan berdasarkan hasil rekomendasi hasil evaluasi dan monitoring;
 - 6) Mendorong pencapaian sasaran dengan memanfaatkan anggaran diluar Pusat Pelatihan KP melalui kerjasama program pelatihan;
 - 7) Mengupayakan terpenuhinya sarana dan prasarana standar pelatihan secara bertahap;
 - 8) Memberikan informasi pelatihan secara cepat, terkini dan akurat kepada *stakeholders*;
 - 9) Mendorong tersedianya kurikulum dan media belajar bagi pelatihan teknis dan fungsional;
 - 10) Memacu standarisasi pelatih dan tenaga pengelola pelatihan,;
 - 11) Memberikan kesempatan bagi setiap pelatih dan tenaga pengelola pelatihan untuk mengikuti pelatihan dalam rangka mengisi, membina dan mengembangkan kompetensi jabatan atau kompetensi kerjanya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Pelatihan KP dan UPT Pelatihan didukung oleh SDM yang profesional di bidang kepelautan, konservasi, penangkapan ikan, kampung nelayan maju, budidaya, pengawasan dan pengendalian pesisir dan pulau-pulau kecil, serta manajemen. Berbagai upaya peningkatan mutu tenaga kepelatihan terus dilakukan sesuai tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tuntutan dari masyarakat tentang pelayanan yang lebih baik.

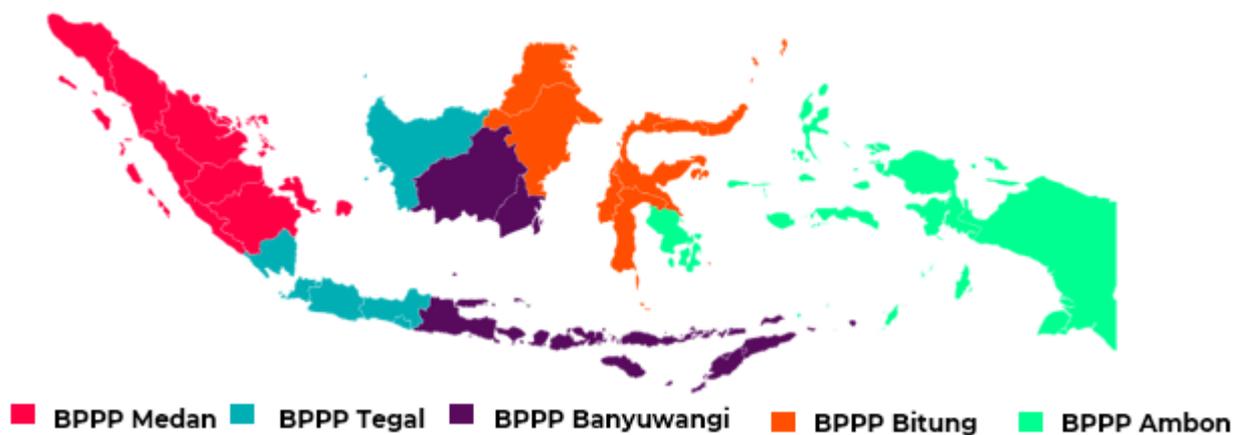
Sebagai lembaga yang bertanggungjawab dan penjamin mutu penyelenggaraan pelatihan di bidang KP, Pusat Pelatihan KP dan UPT Pelatihan memiliki wilayah pelatihan yang secara keseluruhan dapat melayani pelatihan di seluruh Indonesia.

Tabel 6. Wilayah Pelatihan UPT Pelatihan KP

| No. | Satuan Kerja | Wilayah Pelatihan (Provinsi) | Keterangan |
|-----|--------------|---|--------------------------------|
| 1. | BPPP Medan | Aceh, Sumut, Sumbar, Kepri, Riau, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Sumsel | 9 Provinsi, 127 Kabupaten/Kota |
| 2. | BPPP Tegal | Lampung, Banten, Jabar, DKI Jakarta, Jateng, DI Yogyakarta, Kalbar, Kalteng | 8 Provinsi, 98 Kabupaten/Kota |

| | | | |
|----|-----------------|--|-------------------------------|
| 3. | BPPP Banyuwangi | Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalsel | 5 Provinsi, 64 Kabupaten/Kota |
| 4. | BPPP Bitung | Sulut, Gorontalo, Sulteng, Sulbar, Sulse, Kaltim Kalut | 7 Provinsi, 79 Kabupaten/Kota |
| 5. | BPPP Ambon | Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Sultra | 5 Provinsi, 57 Kabupaten/Kota |
| 6. | BDA Sukamandi | Seluruh Indonesia | 34 Provinsi |

WILAYAH KERJA BALAI PELATIHAN



Gambar 3. Wilayah Kerja Balai Pelatihan

Untuk melaksanakan kegiatan pelatihan tertentu, Pusat Pelatihan KP dan UPT Pelatihan dapat mendatangkan Pelatih dari luar instansi guna memberikan mata pelatihan sesuai dengan tuntutan kurikulum atau kondisi aktual di lapangan.

Potensi dan Permasalahan

Masalah dan tantangan tentunya dihadapi oleh Pusat Pelatihan KP dalam kiprahnya dalam mengembangkan SDM Kelautan dan Perikanan guna mendukung pembangunan yang dilaksanakan oleh KKP secara keseluruhan.

Permasalahan dalam pengembangan SDM-KP dalam khususnya di bidang pelatihan diantaranya:

- A. Aspek pengembangan SDM-KP dalam bidang pelatihan, dukungan terhadap sumberdaya pelatihan yang belum memadai dibandingkan dengan kebutuhan peningkatan kapasitas SDM-KP yang mendesak untuk dipecahkan secara sistematis dan konsisten. Permasalahan dalam pengembangan SDM-KP dalam bidang pelatihan, diantaranya:

- a) Rendahnya realisasi pelatihan yang mendukung program kampung nelayan maju.
 - b) Kebutuhan akan Tenaga Pelatih (instruktur dan widyaiswara) baik untuk di Balai Pelatihan dan P2MKP yang memiliki sertifikasi kompetensi sesuai dengan bidang pelatihan yang diampu;
 - c) Sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar minimal pelatihan yang telah ditetapkan, terutama kegiatan pelatihan yang dilaksanakan di P2MKP, mengingat jenis pelatihan dan kondisi P2MKP yang bervariasi;
 - d) Sebaran dan jangkauan pelatihan, khususnya pelatihan yang dipersiapkan mendukung program prioritas KKP;
 - e) Penyediaan kurikulum/modul Pelatihan yang terstandarisasi sehingga diperlukan standarisasi kurikulum/modul pelatihan;
 - f) Perekrutan peserta latih belum sepenuhnya dapat mengakomodir kebutuhan program nasional dan kementerian;
 - g) Rendahnya kompetensi masyarakat KP dan belum meratanya kompetensi yang dimiliki dan dikuasai oleh masyarakat KP di setiap wilayahnya;
 - h) Pemetaan kebutuhan SDM KP yang kompeten dalam rangka pengelolaan sumber daya KP yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan masih jarang dilakukan;
 - i) Minimnya upaya peningkatan kapasitas dan kelembagaan sesuai dengan standar penyelenggaraan pelatihan di bidang kelautan dan perikanan;
 - j) Standarisasi kompetensi masih terbatas jumlahnya;
 - k) Dukungan peraturan dan perundangan berkaitan dengan pelayanan belum memadai;
 - l) Belum optimalnya lembaga pelatihan KP dalam memenuhi kebutuhan peningkatan kapasitas aparatur KP, kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha dalam suatu sistem bisnis perikanan.
- B. Aspek Pelaku utama/usaha yang menjadi sasaran utama pelatihan perikanan diantaranya:
- a) Tingkat pendidikan dan kompetensi relatif rendah;
 - b) Usaha yang dikembangkan masih secara parsial dengan teknologi terapan konvensional;
 - c) Skala luasan usaha kecil, individual dan variatif, tersebar tidak dalam suatu kawasan/wilayah pengembangan;
 - d) Produk yang dihasilkan sebagian besar dalam bentuk produk primer.

- C. Akses pelaku utama terhadap kelembagaan inovasi dan kelembagaan ekonomi masih lemah; Masih terdapat kesenjangan hasil antara hasil nyata di lapangan dengan hasil yang diperoleh dari penelitian dan pengkajian yang telah direkomendasikan.

Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian laporan kinerja Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan sebagai berikut:

- 1) **Ringkasan Eksekutif**, pada bagian ini berisi ringkasan dari laporan ini, antara lain berisi uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capain kinerja dan kendala sampai dengan tahun 2024.
- 2) **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini berisi hal-hal umum tentang latar belakang penyusunan, maksud dan tujuan, gambaran organisasi, aspek strategis organisasi, seperti tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta keragaan SDM di Pusat Pelatihan KP.
- 3) **Bab II Perencanaan Kinerja**, pada bab ini uraian singkat tentang Rencana Strategis Pusat Pelatihan KP tahun 2020-2024, Rencana Kinerja dan Penetapan kinerja Tahun 2024, serta metode Pengukuran Kinerja.
- 4) **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, bab ini dijelaskan hasil capaian kinerja dari indikator-indikator kinerja yang telah diuraikan pada bab sebelumnya disertai beberapa capaian indikator kinerja lainnya, serta Akuntabilitas Keuangan
- 5) **Bab IV Penutup**, bab ini berisi uraian singkat terkait Kesimpulan, Pemasalahan dan Rekomendasi Kebijakan.
- 6) **LAMPIRAN**, berisi lampiran PK awal dan PK Revisi Pusat Pelatihan KP Tahun 2024.



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA



perencanaan kinerja

BAB II - PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis 2020-2024

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai salah satu kementerian ekonomi, pada hakekatnya tercermin dari seluruh kebijakannya yang diarahkan dalam kerangka pembangunan ekonomi. Komponen utama ekonomi kelautan dan perikanan menyangkut dengan persoalan produksi dan pendapatan yang harus dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Visi Nasional adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berdasarkan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Misi Nasional yaitu:

- 1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- 2) Struktur Ekonomi yang produktif, merata dan berdaya saing;
- 3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- 4) Mencapai Lingkungan Hidup yang berkelanjutan;
- 5) Kemajuan Budaya yang mencerminkan kepribadian Bangsa;
- 6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
- 7) Perlindungan bagi segenap Bangsa dan memberikan rasa Aman pada seluruh warga;
- 8) Pengelolaan Pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya;
- 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Program Utama Kegiatan Prioritas Presiden

Kementrian Kelautan dan Perikanan siap mendukung dan melaksanakan 5 program utama sebagai prioritas Presiden yaitu:

- 1) Membangun sumber daya manusia (SDM);
- 2) Melanjutkan pembangunan infrastruktur;
- 3) Menghapus kendala regulasi;
- 4) Menyederhanakan birokrasi, dan;
- 5) Melakukan transformasi ekonomi.

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan pada:

- 1) Peningkatan SDM;
- 2) Pemberdayaan dan perlindungan usaha, pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP);
- 3) Peningkatan pengawasan SDKP;

- 4) Industrialisasi kelautan dan perikanan;
- 5) Peningkatan usaha dan investasi;
- 6) Penguatan kebijakan dan regulasi berbasis data, informasi, pengetahuan faktual; dan
- 7) Komunikasi dengan stakeholders; dan reformasi birokrasi.

Kebijakan Pembangunan KKP merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi Nasional dalam rangka mencapai sasaran strategi pembangunan kelautan dan perikanan 2020-2024. Dengan demikian Kebijakan Pusat Pelatihan KP adalah:

- 1) Peningkatkan keterampilan dan kompetensi SDM sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktivitas, nilai tambah dan daya saing produk kelautan dan perikanan secara optimal melalui pelatihan dan sertifikasi;
- 2) Mewujudkan pelaku utama yang mandiri, kompeten, sadar dan peduli terhadap inovasi teknologi, kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- 3) Membantu dalam meningkatkan ekonomi para pelaku usaha melalui penumbuhan dan pembentukan usaha mikro, kecil dan koperasi sektor kelautan dan perikanan; serta
- 4) Meningkatkan pengelolaan alih teknologi bidang kelautan dan perikanan secara efektif dan efisien dan tepat sasaran melalui diseminasi teknologi dan pelatihan.

Tujuan

Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan (KP) jangka panjang pada periode pembangunan tahap ke 4 (2020-2024) adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Hal ini ditegaskan dalam misi ketujuh Pembangunan nasional yaitu mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju dengan basis kepentingan Nasional.

Sasaran Kegiatan

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran Strategis (SS) KKP terdiri dari :

- 1) SS-1 Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat
- 2) SS-2 Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan
- 3) SS-3 Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat

- 4) SS-4 Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat
- 5) SS-5 Tatakelola SDKP bertanggung jawab
- 6) SS-6 Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing
- 7) SS-7 Pengawasan dan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan efektif
- 8) SS-8 Reformasi Birokrasi KKP yang berkualitas.

Dengan memperhatikan misi KKP dan tujuan BPPSDM Tahun 2020-2024, maka sasaran program (SP) yang akan dicapai BPPSDM pada Tahun 2020-2024 mengacu pada sasaran strategis KKP adalah sebagai berikut :

- 1) SP-1 SDM KP Peserta Diklat yang Terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri
- 2) SP-2 SDM KP Peserta Diklat untuk Membentuk Start Up (Usaha Rintis)
- 3) SP-3 Kelompok Kelautan dan Perikanan yang ditumbuhkan dan dikembangkan
- 4) SP-4 Iptek Hasil Kegiatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan KP yang Dimanfaatkan oleh Masyarakat
- 5) SP-5 Sarana dan Prasarana Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan yang Ditingkatkan
- 6) SP-6 Tatakelola pemerintahan yang baik Lingkup BPPSDM

Untuk melaksanakan pencapaian Sasaran Program sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan output dan outcome BPPSDM. Oleh karena itu, Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan memiliki sasaran kegiatan (SK) yang akan dicapai Tahun 2024 mengacu pada sasaran program BPPSDM yang diturunkan dari sasaran strategis KKP yaitu;

Sasaran Kegiatan (SP-1) “Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan” dengan indikator kinerja sesuai dengan PK Pusat Pelatihan KP Tahun 2024 sebagai berikut:

- 1) Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri dari 70% pada tahun 2023 menjadi 72% pada tahun 2024.
- 2) Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih target pada Tahun 2024 sebanyak 35.173 orang, dan kumulatif target tahun 2020-2024 sebanyak 121.226 orang.
- 3) Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Pelatihan KP dari target 3,99 Milyar Rupiah pada Tahun 2022 menjadi 13,416 Milyar Rupiah pada tahun 2024.
- 4) Tenaga kerja yang terlibat di lingkup Pusat Pelatihan KP Tahun 2024 ini ditargetkan sebanyak 122 orang, sementara selama periode Renstra 2020-2024 jika dikumulatifkan target tenaga kerja yang terlibat di lingkup Pusat Pelatihan KP adalah sebanyak 26.546 orang.

Sasaran Kegiatan (SP-2) “SDM KP Terselenggaranya Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan” dengan indikator kinerja sesuai dengan PK Pusat Pelatihan KP Tahun 2024 sebagai berikut:

- 1) SDM KP yang bersertifikat kompetensi target pada Tahun 2024 sebanyak 1.450 orang dan secara kumulatif target 2020-2024 sebanyak 4.308 orang.

Sasaran Kegiatan (SP-3) “Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan KP” dengan indikator kinerja sesuai dengan PK Pusat Pelatihan KP Tahun 2024 sebagai berikut:

- 1) Lulusan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) dari target pada Tahun 2024 sebanyak 147 orang dan secara kumulatif tahun 2020-2024 sebanyak 478 orang.
- 2) Materi Pelatihan berbasis Kaji Widya (paket) dari target 5 pada tahun 2024 dan kumulatif target tahun 2020-2024 sebanyak 41 paket Kajiwidya.

Sasaran Kegiatan (SP-4) “Tersedianya Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pelatihan dan Penyuluhan KP” dengan indikator kinerja sesuai dengan PK Pusat Pelatihan KP Tahun 2024 sebagai berikut:

- 1) Norma, Standar, Prosedur dan Kreteria Pelatihan dan Sertifikasi yang disusun (NSPK) target NSPK pada tahun 2024 sebanyak 4 NSPK, dan untuk target berdasarkan reuiu Renstra 2020-2024 secara kumulatif adalah sebanyak 23 NSPK.
- 2) Kelembagaan Pelatihan yang tersertifikasi sesuai standar lembaga pelatihan dengan target 2024 sebanyak 7 lembaga, dan untuk target berdasarkan reuiu renstra 2020-2024 adalah sebanyak 7 lembaga.
- 3) Persentase Usulan Sertifikasi Program Diklat Masyarakat Bidang Kelautan dan Perikanan yang disahkan sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan target 2024 sebesar 75%. IKU ini baru muncul di 2024.
- 4) Jejaring dan/atau kerjasama lingkup Pusat Pelatihan KP yang disepakati dan ditindaklanjuti dengan target 12 PKS pada tahun 2024, dan berdasarkan target Renstra total tahun 2020-2024 adalah sebanyak 46 PKS.

Sasaran Kegiatan (SP-5) “Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan” dengan indikator kinerja sesuai dengan PK Pulatluh KP Tahun 2024 sebagai berikut:

- 1) Sarana pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya dengan target tahun 2024 sebanyak 6 unit serta target selama periode Renstra tahun 2020-2024 adalah sebanyak 39 unit.

- 2) Prasarana pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya dengan target tahun 2024 sebanyak 5 unit serta target selama periode Renstra tahun 2020-2024 adalah sebanyak 19 unit.

Sasaran Kegiatan (SP-6) “Aparatur Yang Dididik dan Dilatih” dengan indikator kinerja sesuai dengan PK Pusat Pelatihan KP Tahun 2024 sebagai berikut:

- 1) Aparatur KP yang dilatih dengan target tahun 2024 sebanyak 5.165 orang serta target selama periode Renstra tahun 2020-2024 adalah sebanyak 22.690 orang.
- 2) Akreditasi Lembaga Penyelenggara Diklat Aparatur dengan target tahun 2024 sebanyak 1 Lembaga. IKU ini baru muncul di 2024.
- 3) Persentase partisipasi unit organisasi dalam rangka implementasi Corporate University di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar 10%. IKU ini baru muncul di 2024.
- 4) Lembaga/Instansi yang memanfaatkan fungsi pelayanan Peningkatan Kompetensi ASN Kelautan dan Perikanan (Lembaga) dengan target 5 lembaga. IKU ini baru muncul di 2024.

Sasaran Kegiatan (SP-7) “Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1 dan Satker” dengan indikator kinerja sesuai dengan PK Pusat Pelatihan KP Tahun 2024 sebagai berikut:

- 1) Persentase layanan dukungan manajemen internal Pusat Pelatihan KP target setiap tahun nya adalah 100%.
- 2) Unit kerja lingkup Pusat Pelatihan KP yang lolos penilaian WBK, Tim Penilai Internal KKP dengan target tahun ini 1 satker dan sampai dengan tahun 2024 ini sebanyak 6 Satker lingkup Pusat Pelatihan KP berpredikat WBK.
- 3) Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Pelatihan KP dengan target 87 pada tahun 2021 menjadi 94 pada tahun 2024.
- 4) Persentase unit kerja Pusat Pelatihan KP yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%) dengan target 82 pada tahun 2020 menjadi 94 pada tahun 2024.
- 5) Indeks Profesionalitas ASN Pusat Pelatihan KP dari 72 pada tahun 2020 menjadi 81 pada tahun 2024.
- 6) Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Pusat Pelatihan KP sebesar $\leq 1\%$ pada tahun 2020 menjadi $\leq 0,5\%$ pada tahun 2024.
- 7) Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Pusat Pelatihan KP (%), sebesar 60% pada tahun 2020 menjadi 82% pada tahun 2024.

- 8) Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja Pusat Pelatihan KP dengan target 1 inovasi setiap tahunnya selama 2022-2024.
- 9) Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Pelatihan KP dengan target nilai sampai 2024 sebanyak 81.

Rencana Kerja Tahun 2024

Adapun kegiatan prioritas Pusat Pelatihan KP termasuk UPT Pelatihan KP dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kinerja utama yaitu:

1. Pelatihan Masyarakat.

Pelatihan masyarakat akan diberikan kepada masyarakat sebanyak 35.173 orang, yang difokuskan kepada pelatihan-pelatihan dengan metode *blended*/campuran dan pelatihan klasikal. Pelatihan ini dilaksanakan oleh 5 (lima) Balai Diklat, yaitu: BPPP Medan, BPPP Tegal, BPPP Banyuwangi, BPPP Aertembaga, dan BPPP Ambon.

2. Pelatihan Aparatur.

Pelatihan aparatur bagi 5.165 orang ASN KKP adalah sebagai upaya KKP untuk meningkatkan kompetensi SDM aparatur KP, dilakukan melalui penyelenggaraan diklat struktural, teknis, fungsional, dan prajabatan yang dilaksanakan oleh BDA Sukamandi dengan metode online/daring/blended menggunakan aplikasi e-milea.

3. Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPSDM

Kegiatan dukungan manajemen seperti pemenuhan dokumen internal sebesar 100%, satker yang lolos penilaian WBK, nilai rekon kinerja, pemenuhan MP, nilai IP ASN, penyelesaian tindak lanjut temuan BPK-RI, penyelesaian rekomendasi pengawasan, inovasi pelayanan publik dan penilaian mandiri SAKIP Pusat Pelatihan KP.

Tabel 7. Rencana Kerja dan Anggaran TA 2024

| NO. | KEGIATAN | PK APRIL |
|-----|---|------------------------|
| 1 | Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan KP | 74.124.614.000 |
| 2 | Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur KP | 5.500.000.000 |
| 3 | Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPSDM | 299.160.882.000 |
| | JUMLAH | 378.785.496.000 |

Sumber : Dok PK Pusat Pelatihan KP April 2024

Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Untuk dapat mengukur keberhasilan dari implementasi Rencana Strategis Tahun 2024 diatas, Pusat Pelatihan KP menetapkan target IKU untuk masing-masing sasaran strategis yang harus dicapai. Target ini dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 berbasis Logical framework.

Logical Framework Analysis (LFA) adalah instrumen analisis, presentasi dan manajemen yang dapat membantu perencana untuk menganalisis situasi eksisting, membangun hirarki logika dari tujuan yang akan dicapai, mengidentifikasi resiko potensial yang dihadapi dalam pencapaian tujuan dan hasil, membangun cara untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tujuan (*output*) dan hasil (*outcomes*), menyajikan ringkasan aktivitas suatu kegiatan serta membantu upaya monitoring selama pelaksanaan implementasi proyek.

Target tersebut ditetapkan untuk setiap indikator kinerja, baik untuk indikator kinerja tingkat sasaran maupun indikator kinerja utama untuk tingkat kegiatan (*input, output, dan outcome*). Pada tahun 2024 Perjanjian Kinerja Level 2 Pusat Pelatihan KP belum mengalami perubahan, pada bulan Januari 2024 Pusat Pelatihan KP memiliki 7 Sasaran Kegiatan dan 26 Indikator Kinerja.

Tabel 8. Perjanjian Kinerja Pusat Pelatihan KP Tahun 2024

| NO | SASARAN KEGIATAN | NO | INDIKATOR KINERJA UTAMA | Target |
|----|--|----|--|--------|
| 1 | Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan | 1 | Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri (%) | 72 |
| | | 2 | Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih (orang) | 35.173 |
| | | 3 | Nilai PNBPN Satker Lingkup Pusat Pelatihan KP (Rupiah Milyar) | 13,416 |
| | | 4 | Tenaga kerja yang terlibat di lingkup Pusat Pelatihan KP (orang) | 122 |
| 2 | Terselenggaranya Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan | 5 | SDM KP yang bersertifikat kompetensi (orang) | 1.450 |
| 3 | Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan KP | 6 | Lulusan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) (orang) | 147 |
| | | 7 | Materi Pelatihan berbasis Kaji Widya (paket) | 5 |
| 4 | Tersedianya Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pelatihan dan Penyuluhan KP | 8 | Norma, Standar, Prosedur dan Kreteria Pelatihan dan Sertifikasi yang disusun (NSPK) | 4 |
| | | 9 | Kelembagaan Pelatihan yang tersertifikasi sesuai standar lembaga pelatihan (Lembaga) | 7 |

| NO | SASARAN KEGIATAN | NO | INDIKATOR KINERJA UTAMA | Target |
|----|--|----|--|--------|
| | | 10 | Persentase Usulan Sertifikasi Program Diklat masyarakat Bidang Kelautan dan Perikanan yang disahkan sesuai dengan Peraturan yang berlaku (%) | 75 |
| | | 11 | Jejaring dan/atau kerjasama lingkup Pusat Pelatihan KP yang disepakati dan ditindaklanjuti (Dokumen) | 12 |
| 5 | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan | 12 | Sarana pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya (unit) | 6 |
| | | 13 | Prasarana pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya (unit) | 5 |
| 6 | Aparatur Yang Dididik dan Dilatih | 14 | Aparatur KP yang dilatih (orang) | 5.165 |
| | | 15 | Akreditasi Lembaga Penyelenggara Diklat Aparatur (Lembaga) | 1 |
| | | 16 | Persentase partisipasi unit organisasi dalam rangka implementasi Corporate University di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (%) | 10 |
| | | 17 | Lembaga / Instansi yang memanfaatkan fungsi pelayanan Peningkatan Kompetensi ASN Kelautan dan Perikanan (Lembaga) | 5 |
| 7 | Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1 dan Satker | 18 | Persentase layanan dukungan manajemen internal Pusat Pelatihan KP (%) | 100 |
| | | 19 | Unit kerja lingkup Pusat Pelatihan KP yang lolos penilaian WBK, Tim Penilai Internal KKP (Satker) | 1 |
| | | 20 | Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Pelatihan KP (Nilai) | 94 |
| | | 21 | Persentase unit kerja Pusat Pelatihan KP yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%) | 94 |
| | | 22 | Indeks Profesionalitas ASN Pusat Pelatihan KP (indeks) | 81 |
| | | 23 | Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Pusat Pelatihan KP (%) | ≤0,5 |
| | | 24 | Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Pusat Pelatihan KP (%) | 82 |
| | | 25 | Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja Pusat Pelatihan KP (Inovasi) | 1 |
| | | 26 | Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Pelatihan KP (Nilai) | 81 |

Sumber : Dokumen PK Pusat Pelatihan KP April 2024

Rumus Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah proses dimana organisasi menetapkan parameter hasil untuk dicapai oleh program, investasi, dan akuisisi yang dilakukan. Proses pengukuran kinerja seringkali membutuhkan penggunaan bukti statistik untuk menentukan tingkat kemajuan suatu organisasi dalam meraih tujuannya. Tujuan mendasar dibalik dilakukannya pengukuran adalah untuk meningkatkan kinerja secara umum.

Pengukuran Kinerja juga merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

Logical Framework Analysis (LFA) adalah instrumen analisis, presentasi dan manajemen yang dapat membantu perencana untuk menganalisis situasi eksisting, membangun hirarki logika dari tujuan yang akan dicapai, mengidentifikasi resiko potensial yang dihadapi dalam pencapaian tujuan dan hasil, membangun cara untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tujuan (*output*) dan hasil (*outcomes*), menyajikan ringkasan aktivitas suatu kegiatan serta membantu upaya monitoring selama pelaksanaan implementasi proyek (Ausguidline, 2005).

Selama ini pemanfaatan **Logical Framework Analysis** masih terbatas bertujuan untuk melakukan proses perencanaan proyek yang bersifat partisipatoris dan berorientasi tujuan. Teknik ini memerlukan keterlibatan seluruh stakeholder terkait dalam suatu rencana/ program untuk menentukan prioritas dan rencana implementasi. Padahal *LFA* merupakan alat bantu analisis dan manajemen yang dapat menjelaskan analisis situasi yang menjadi alasan atau argumentasi penting suatu program, kaitan logis sebab-akibat secara hirarki hubungan antara tujuan yang akan dicapai dengan proses yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, identifikasi potensi-potensi resiko yang akan dihadapi dalam pelaksanaan program, mekanisme bagaimana hasil-hasil kerja (*output*) dan dampak program (*outcome*) akan dimonitor dan dievaluasi dan penyajian ringkasan program dalam suatu format standard.

LFA digunakan ketika melakukan identifikasi dan penjajagan dalam penyusunan proposal, menyiapkan disain proyek/ program dalam suatu sistematis dan kaitan yang masuk akal, penilaian disain proyek/ program, memutuskan persetujuan untuk pelaksanaan proyek/ program, monitoring dan evaluasi kemajuan (*progress*) dan kinerja (*performance*) program.

LFA juga dapat digunakan sebagai petunjuk teknis dalam pengelolaan program, atau tepatnya kemampuan teknis, bahwa yang bersangkutan mempunyai kemampuan teknis dalam menyelenggarakan suatu program. Logical Framework sebagai kemampuan teknis program karena dapat digunakan sebagai alat untuk Perencanaan, Penilaian, Monitoring dan Evaluasi dari kegiatan-kegiatan dalam program yang telah dibuat.

Kerangka logika sebagai teknis dalam mengkombinasikan Logika Vertikal maupun Logika Horisontal. Tujuan yang ditetapkan dapat diukur dengan indikator melalui informasi yang dikumpulkan dan disajikan dalam alat verifikasi khusus.

Dalam pelaksanaannya Logframe disusun dalam bentuk Matrix atau biasa disebut dengan logframe matrix yang terdiri atau mempunyai 4 elemen dasar yaitu: Hubungan antara *Goals*, *Objectives*, *Outputs* dan *Activities* Logika Vertikal dan Logika Horisontal Indikator Asumsi dan resiko yang perlu diidentifikasi pada tahap penyusunan program *Goals* dalam kerangka logis (*logframe*) adalah tingkatan dengan tujuan tertinggi, merupakan hasil akhir tetapi diluar control program. *Objectives* atau sasaran program merupakan Rincian/ Bagian dari *Goal*, namun objectives atau sasaran ini selalunya diluar kontrol program. *Goal* dan *Objectives* diluar kontrol program karena kegiatan-kegiatan tidak langsung mempengaruhinya tetapi dapat dicapai dengan gabungan beberapa dari program yang satu dengan program yang lainnya. Sedangkan *Outputs* itu sendiri adalah hasil spesifik apa yang harus diperoleh sesudah program berakhir dan *Activities* adalah Kegiatan-kegiatan apa yang harus disusun untuk memperoleh *outputs*.

Dalam matriks logframe kita juga dapatkan istilah *Objectively Verifiable Indicators* atau disingkat OVI yaitu atau dalam bahasa Indonesia disebut indikator verifikasi sasaran tujuan, mengarahkan kita untuk bagaimana kita tahu bahwa program itu berhasil, membantu kita untuk klarifikasi, membantu kegiatan monitoring dan evaluasi dan penggunaannya atau indikatornya dibuat dengan pendekatan *SMART* (*Specific, Measurable, Attainable, Realibility and Timely*).

Metode Pengukuran kinerja

Pengukuran capaian kinerja Pusat Pelatihan KP Tahun 2024, dilakukan dengan membandingkan antara data target dan realisasi Indikator Kinerja, akan diperoleh indeks capaian Indikator Kinerja. Penghitungan indeks capaian Indikator Kinerja perlu memperhitungkan jenis polarisasi Indikator Kinerja yang berlaku yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian Indikator Kinerja adalah:

- 1) Angka maksimum adalah 120;
- 2) Angka minimum adalah 0;
- 3) Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda;

Adapun status Indeks capaian IKU adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Indeks Capaian IKU

| Warna | Keterangan |
|---------------|-----------------|
| Istimewa | Nilai 100 – 120 |
| Baik | Nilai 90 - <100 |
| Cukup | Nilai 70 - <90 |
| Kurang | Nilai 50 - <70 |
| Sangat kurang | Nilai <50 |

Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada Manual IKU pada masing-masing Indikator yang ada dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Metode pengukuran kinerja lingkup Pusat Pelatihan KP dilakukan secara berkala per triwulan. Pengukuran kinerja dilaksanakan oleh tim yang melaksanakan pengukuran dan pelaporan kinerja berdasarkan Surat Tugas Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan nomor 42 Tahun 2024 tanggal 1 April 2024. Pengukuran kinerja dilakukan secara berjenjang dari level 3 unit pelaksana teknis sampai ke level 2 pusat-pusat.



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

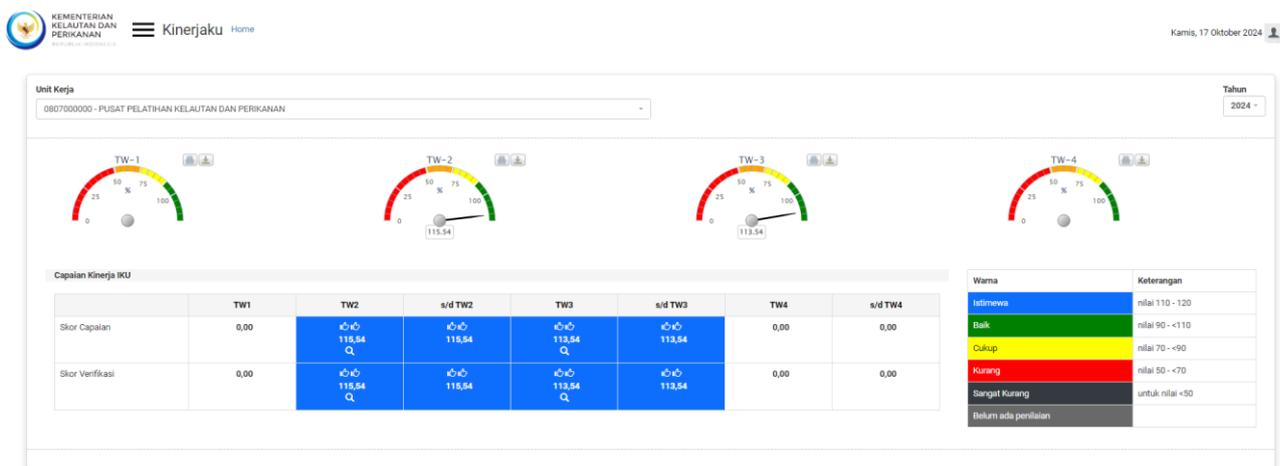


akuntabilitas kinerja

BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA

Prestasi Kinerja Pusat Pelatihan KP

Pengukuran capaian kinerja Pusat Pelatihan KP triwulan II tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi IKU (key performance indicator, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis balanced scorecard dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu Aplikasi Kinerjaku yang dapat diakses secara daring pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Capaian nilai kinerja Pusat Pelatihan KP pada triwulan II tahun 2024 adalah **113,54% - ISTIMEWA** seperti pada tampilan grafik dashboard dibawah ini :



Gambar 4. Tampilan Kinerjaku

Capaian keberhasilan untuk triwulan II tahun 2024 adalah istimewa, dengan capaiannya dalam beberapa IKU Utama sudah melebihi target yang ditetapkan.

Evaluasi dan Analisis Kinerja

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi nasional. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan

pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasi agar sasaran strategis dan tujuan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategis Pusat Pelatihan KP yang menjadi kontrak kinerja pada Tahun 2023 dapat tercapai.

Pendekatan Analisis Capaian Kinerja Organisasi sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 menetapkan tinjauan-tinjauan sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Tabel 10. Capaian Kinerja Triwulan III tahun 2024 pada Pusat Pelatihan KP

| NO | SASARAN KEGIATAN | NO | INDIKATOR KINERJA UTAMA | Target | Target TW 3 | CAPAIAN | % |
|----|---|----|--|--------|-------------|---------|--------|
| 1 | Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan | 1 | Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri (%) | 72 | | | |
| | | 2 | Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih (orang) | 35.173 | 28.834 | 35.148 | 120,00 |
| | | 3 | Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Pelatihan KP (Rupiah Milyar) | 13,416 | 8,99 | 16,85 | 120,00 |
| | | 4 | Tenaga kerja yang terlibat lingkup Pusat Pelatihan KP (orang) | 122 | | | |
| 2 | Terselenggaranya Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan | 5 | SDM KP yang bersertifikat kompetensi (orang) | 1.450 | 853 | 1299 | 120 |
| 3 | Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan KP | 6 | Lulusan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) (orang) | 147 | | | |
| | | 7 | Materi Pelatihan berbasis Kaji Widya (paket) | 5 | | | |

| NO | SASARAN KEGIATAN | NO | INDIKATOR KINERJA UTAMA | Target | Target TW 3 | CAPAIAN | % |
|----|--|----|--|--------|-------------|---------|--------|
| 4 | Tersedianya Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pelatihan dan Penyuluhan KP | 8 | Norma, Standar, Prosedur dan Kreteria Pelatihan dan Sertifikasi yang disusun (NSPK) | 4 | | | |
| | | 9 | Kelembagaan Pelatihan yang tersertifikasi sesuai standar lembaga pelatihan (Lembaga) | 7 | | | |
| | | 10 | Persentase Usulan Sertifikasi Program Diklat masyarakat Bidang Kelautan dan Perikanan yang disahkan sesuai dengan Peraturan yang berlaku (%) | 75 | | | |
| | | 11 | Jejaring dan/atau kerjasama lingkup Pusat Pelatihan KP yang disepakati dan ditindaklanjuti (Dokumen) | 12 | 10 | 10 | 100 |
| 5 | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan | 12 | Sarana pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya (unit) | 6 | | | |
| | | 13 | Prasarana pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya (unit) | 5 | | | |
| 6 | Aparatur Yang Dididik dan Dilatih | 14 | Aparatur KP yang dilatih (orang) | 5.165 | 4.300 | 5.120 | 119.07 |
| | | 15 | Akreditasi Lembaga Penyelenggara Diklat Aparatur (Lembaga) | 1 | | | |
| | | 16 | Persentase partisipasi unit organisasi dalam rangka implementasi Corporate University di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (%) | 10 | | | |
| | | 17 | Lembaga / Instansi yang memanfaatkan fungsi pelayanan Peningkatan Kompetensi ASN Kelautan dan Perikanan | 5 | | | |
| 7 | Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1 dan Satker | 18 | Persentase layanan dukungan manajemen internal Pusat Pelatihan KP (%) | 100 | 75 | 78,33 | 104,44 |
| | | 19 | Unit kerja lingkup Pusat Pelatihan KP yang lolos penilaian WBK, Tim Penilai Internal KKP (Satker) | 1 | | | |
| | | 20 | Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Pelatihan KP (Nilai) | 94 | | | |

| NO | SASARAN KEGIATAN | NO | INDIKATOR KINERJA UTAMA | Target | Target TW 3 | CAPAIAN | % |
|----|------------------|----|--|--------|-------------|---------|-------|
| | | 21 | Persentase unit kerja Pusat Pelatihan KP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%) | 94 | 94 | 118,19 | 120 |
| | | 22 | Indeks Profesionalitas ASN Pusat Pelatihan KP (indeks) | 81 | | | |
| | | 23 | Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Pusat Pelatihan KP (%) | ≤0,5 | | | |
| | | 24 | Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yg dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Pusat Pelatihan KP (%) | 82 | 82 | 82 | 100.0 |
| | | 25 | Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja Pusat Pelatihan KP (Inovasi) | 1 | | | |
| | | 26 | Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Pelatihan KP (Nilai) | 81 | | | |

Sasaran Program SK.01 - Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja IKSK.01.01 - Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri (%)

DUDI adalah singkatan dari Dunia Usaha dan Dunia Industri. Dunia usaha berkaitan dengan segala aktivitas yang berhubungan dengan aspek-aspek dan fungsi-fungsi sosial dan ekonomi. Dunia industri berkaitan dengan segala pekerjaan untuk merancang, membuat, menghasilkan suatu produk.

Sampai triwulan III, Pusat Pelatihan KP melalui BPPP telah melatih 35.148 orang. Dalam menunjang pencapaian indikator kinerja Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri perlu dilakukan analisis terhadap hasil pelaksanaan pelatihan menggunakan instrument evaluasi pasca pelatihan sebagai bahan masukan untuk perbaikan penyelenggaraan pelatihan berikutnya.

IK Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri ini tidak memiliki target pada rencana aksi triwulan III tahun 2024. Target IK ini diukur pada periode triwulan IV dengan target tahunan sebesar 72%.

Progress kegiatan yang telah dilaksanakan sampai triwulan III adalah sebagai berikut:

- 1) Pusat Pelatihan KP telah menyiapkan draft instrumen moneyv dan pedoman kegiatan moneyv yang selanjutnya akan segera difinalisasi dan disebar ke lulusan

pelatihan. Instrumen yang dihasilkan nantinya akan digunakan sebagai alat untuk melakukan evaluasi pasca pelatihan untuk mengidentifikasi purnawidya yang terserap di dunia usaha/industri.

Indikator Kinerja IKSK.01.02 - Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih (Orang)

IKU terkait Sasaran Strategis terwujudnya kompetensi SDM KP yang mendukung peningkatan produktifitas usaha dan pendapatan negara dari sektor KP ini adalah Jumlah masyarakat yang ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan kelautan dan perikanan, dimana penyelenggaraan pelatihan ini dilaksanakan oleh 5 (lima) Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP), yakni BPPP Medan, BPPP Tegal, BPPP Banyuwangi, BPPP Bitung, dan BPPP Ambon.

IKU Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih merupakan indikator yang menunjukkan jumlah Masyarakat KP yang telah dilatih dengan kriteria yaitu :

- 1) Pelatihan berbasis APBN;
- 2) Peserta merupakan masyarakat (non ASN);
- 3) Penyelenggaraan pelatihan regular (full tatap muka) dan model Blended (kombinasi online dan tatap muka).

Data dukung capaian IKU ini berdasarkan Memo Kepala Pusat Pelatihan Nomor 433/BPPSDM/RC.610/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024 tentang Penyampaian Data Dukung Indikator Kinerja Utama Masyarakat KP yang dilatih Triwulan III tahun 2024.

Tabel 11. Capaian IKU Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih

| Realisasi TW III Puslatluh KP | | | | 2024 | | | | | Renstra PUSLATLUH KP 2020 – 2024 | |
|-------------------------------|--------|--------|--------|-------------|---------------|-----------|-----------|----------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Target 2024 | Target TW III | Realisasi | % Capaian | % Kenaikan 2023-2024 | Target 2024 | % Capaian thd target 2024 |
| 8.444 | 10.800 | 17.033 | 22.924 | 35.713 | 28.834 | 35.148 | 120,00 | 53,32% | 35.713 | 98,42 |

Sumber : Data Capaian Pusat Pelatihan KP

Capaian IKU jumlah masyarakat yang dilatih pada triwulan III tahun 2024 sebesar 35.148 orang atau sebesar 120% dari target triwulan III. Jika dibandingkan dengan target tahunannya telah mencapai 98,42%. Realisasi triwulan III tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 53,32% jika dibanding tahun 2023 di triwulan yang sama. Terhadap target Renstra Tahun 2024 capaian Triwulan III sebesar 98,42%. Berdasarkan target Jumlah Lulusan Pelatihan masyarakat yang dilatih pada masa periode Renstra 2020-2024 sebanyak 121.226 orang, realisasi sampai dengan Triwulan III tahun 2024 ini

adalah sebanyak 125.919 orang atau mencapai 103,87%. Adapun sebaran masyarakat KP yang dilatih per balai hingga triwulan III adalah sebagai berikut ini:

Tabel 12. Rekap Masyarakat KP yang Dilatih menurut Satker

| No | Balai | Target Tahunan | Target TW III | Capaian TW III | % TW III |
|----|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 1 | BPPP MEDAN | 4.074 | 3.092 | 3.363 | 108,76 |
| 2 | BPPP TEGAL | 17.960 | 13.950 | 18.864 | 120,00 |
| 3 | BPPP BANYUWANGI | 6.736 | 6.656 | 7.475 | 112,30 |
| 4 | BPPP BITUNG | 3.101 | 2.738 | 2.906 | 106,14 |
| 5 | BPPP AMBON | 3.302 | 2.398 | 2.540 | 105,92 |
| | Total | 35.173 | 28.834 | 35.148 | 120,00 |

Sumber : Data Capaian Pusat Pelatihan KP

Dari data tersebut, terlihat bahwa semua balai telah mencapai atau bahkan melampaui target triwulan III nya. Balai dengan capaian tertinggi dalam triwulan III adalah BPPP Tegal dengan capaian 18.864 orang, mencapai 120% dari target dan sudah melampaui target tahunannya. BPPP Banyuwangi juga menunjukkan capaian yang signifikan dengan masing-masing 112,30% dan sudah melampaui target tahunannya di triwulan III ini.

Tabel 13. Masyarakat KP yang Dilatih Per Jenis Pelatihan

| Jenis Pelatihan | BPPP Ambon | BPPP Banyuwangi | BPPP Bitung | BPPP Medan | BPPP Tegal | Total |
|-----------------------------------|------------|-----------------|-------------|------------|------------|--------|
| Budidaya | 275 | 2.521 | 1.276 | 1.829 | 5.214 | 11.115 |
| Konservasi | 500 | 822 | 300 | 269 | 731 | 2.622 |
| Manajemen | | | | | 764 | 764 |
| Mesin Perikanan | | | 412 | | | 412 |
| Penangkapan | 1.333 | 1.358 | 54 | 1.165 | 7.075 | 10.985 |
| Pengolahan & Pemasaran | 432 | 2.774 | 864 | 100 | 4.825 | 8.995 |
| SD Perikanan | | | | | 255 | 255 |
| Total | 2.540 | 7.475 | 2.906 | 3.363 | 18.864 | 35.148 |

Sumber : Data Capaian Pusat Pelatihan KP

Tabel yang diperbaiki ini menampilkan jumlah peserta pelatihan dari beberapa jenis pelatihan perikanan yang diselenggarakan oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) di lima wilayah, yaitu Ambon, Banyuwangi, Bitung, Medan, dan Tegal. Data ini menunjukkan total keseluruhan peserta dari masing-masing jenis pelatihan yang dilakukan di berbagai wilayah tersebut, dengan total peserta mencapai 35.148 orang. Pelatihan Budidaya adalah yang paling banyak diminati, dengan jumlah peserta tertinggi berasal dari BPPP Tegal yang mencapai 5.214 peserta, sedangkan jumlah total peserta pelatihan ini di seluruh BPPP mencapai 11.115 orang. Untuk pelatihan Konservasi, BPPP Banyuwangi mencatat jumlah peserta tertinggi dengan 822 orang, sementara total peserta di seluruh lokasi adalah 2.622 orang. Pelatihan Manajemen hanya diadakan di

BPPP Tegal, dengan jumlah peserta sebanyak 764 orang. Mesin Perikanan juga hanya diadakan di satu lokasi, yaitu di BPPP Bitung, dengan 412 peserta. Pelatihan Penangkapan yang berfokus pada teknik penangkapan ikan merupakan salah satu program dengan jumlah peserta yang besar. Sebagian besar peserta berasal dari BPPP Tegal, dengan 7.075 orang dari total 10.985 peserta di seluruh lokasi. Pelatihan Pengolahan & Pemasaran juga menarik banyak peserta, terutama di BPPP Tegal yang mencatat 4.825 peserta. Secara total, pelatihan ini diikuti oleh 8.995 peserta. Terakhir, pelatihan SD Perikanan hanya diadakan di BPPP Tegal, dengan 255 peserta. Berdasarkan data ini, BPPP Tegal terlihat sebagai balai pelatihan dengan output terbesar dengan jumlah peserta yang signifikan, yakni 18.864 peserta.

Adapun faktor penyebab keberhasilan indikator kinerja Masyarakat KP yang dilatih triwulan III Tahun 2024 disebabkan oleh:

- 1) Adanya antusias peserta dari masyarakat dalam mengikuti kegiatan pelatihan kp.
- 2) Adanya Kerjasama dengan Dinas, swasta dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan Pelatihan KP.
- 3) Tersedianya kurikulum/modul pelatihan sesuai dengan kebutuhan pelatihan Masyarakat.
- 4) Tersedianya sistem pelatihan dengan metode blended, dengan bantuan Penyuluh Perikanan di lapangan.
- 5) Tersedianya Instruktur/Widyaiswara yang kompeten sesuai dengan kebutuhan pelatihan Masyarakat.
- 6) Balai Pelatihan di lingkup Pusat Pelatihan KP telah di approve program diklat awak kapal perikanan oleh Lembaga approval.
- 7) Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai serta database penyelenggaraan pelatihan melalui SIMLAT KP sebagai alat pengendalian dalam pelaksanaan pelatihan

Kegiatan pendukung capaian Indikator Kinerja Masyarakat KP yang Dilatih sebagai berikut:

- 1) Kerjasama KKP melalui Pusat Pelatihan KP dengan anggota DPR RI khususnya Komisi IV dilaksanakan lebih awal dibanding biasanya, sebagian besar telah dilaksanakan di triwulan I.
- 2) BLU BPPP Tegal terus melakukan koordinasi dan Kerjasama dengan pemda, NGO, Perusahaan, lembaga swasta lainnya dalam menjaring peserta pelatihan.
- 3) Melakukan koordinasi perencanaan jadwal pelaksanaan pelatihan dengan Balai Pelatihan.

- 4) Melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai kegiatan pelatihan yang akan dilakukan

Indikator Kinerja IKSK.01.03 - Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Pelatihan KP (Rupiah Milyar)

Pada dasarnya, penerimaan negara terbagi atas 2 jenis penerimaan, yaitu penerimaan dari pajak dan penerimaan bukan pajak yang disebut penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Menurut UU no. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Kecuali jenis PNBP yang ditetapkan dengan Undang-undang, jenis PNBP yang tercakup dalam kelompok sebagaimana terurai diatas, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Artinya diluar jenis PNBP terurai diatas, dimungkinkan adanya PNBP lain melalui UU. PNBP yang dilakukan oleh Pusat Pelatihan KP adalah dengan kegiatan Pelatihan, dan Sarana Prasarana Gedung dan Worskhop.

Tabel 14. Capaian IKU Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Pelatihan KP

| Realisasi TW III Puslatluh KP | | | | 2024 | | | | | Renstra PUSLATLUH KP 2020 – 2024 | |
|-------------------------------|------|------|------|-------------|---------------|-----------|-----------|----------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Target 2024 | Target TW III | Realisasi | % Capaian | % Kenaikan 2023-2024 | Target 2024 | % Capaian thd target 2024 |
| | | 4,00 | 7,64 | 13,416 | 8,99 | 17,68 | 120,00 | 131,32% | 13,416 | 131,78 |

Sumber : Data Capaian Pusat Pelatihan KP

Pada Tabel diatas dapat dilihat bahwa Capaian IKU Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Pelatihan KP pada Triwulan III Tahun 2024 sebesar Rp.17.675.261.898,-. Atau 120% dari target Triwulan III sebesar Rp8.990.000.000,-. Jika dibandingkan dengan target tahunan sebesar Rp13.415.665.000,-. maka realisasi mencapai 131,78%. Jika dibandingkan dengan capaian Triwulan III pada tahun 2023 sebesar Rp7.642.408.210,- ada kenaikan sebesar 131,32% dari Tahun 2023. Berdasarkan target kumulatif nilai PNBP Satker lingkup Pusat Pelatihan KP pada Renstra 2020-2024 sebesar 27,18 Milyar Rupiah, realisasi sampai dengan Triwulan III tahun 2024 ini adalah sebanyak 37,11 Milyar Rupiah (136,53%).

Tabel 15. Rekap IKU Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Pelatihan KP

| No | Unit Kerja | Target Tahunan (Rp) | Target TW III (Rp) | Capaian TW III (Rp) | % TW III |
|----|-----------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------|
| 1 | BPPP MEDAN | 380.000.000 | 380.000.000 | 427.578.644 | 112,52 |
| 2 | BPPP TEGAL | 10.530.206.000 | 7.350.000.000 | 12.090.113.818 | 120 |
| 3 | BPPP BANYUWANGI | 770.875.000 | 700.000.000 | 1.354.171.252 | 120 |
| 4 | BPPP BITUNG | 188.600.000 | 130.000.000 | 388.437.161 | 120 |

| | | | | | |
|--------------|---------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|------------|
| 5 | BPPP AMBON | 681.984.000 | 200.000.000 | 2.822.492.856 | 120 |
| 6 | BDA SUKAMANDI | 864.000.000 | 230.000.000 | 592.468.167 | 120 |
| Total | | 13.415.665.000 | 8.990.000.000,00 | 17.675.261.898,00 | 120 |

Sumber : Data Capaian Pusat Pelatihan KP

Tabel ini memuat data mengenai target tahunan, target triwulan III, capaian triwulan III, dan persentase capaian triwulan III untuk Satuan Kerja (Satker) di lingkup Pusat Pelatihan KP. Total Target Tahunan PNBPN di lingkup Pusat pelatihan KP sebanyak Rp13.415.665.000,- pada triwulan III ini targetnya adalah Rp8.990.000.000,-. Realisasi Total Capaian triwulan III ini sebanyak Rp17.675.261.898,- atau mencapai 120%. Dari data tersebut, terlihat bahwa semua Satker telah mencapai target untuk triwulan III, menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam mencapai target PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak). BPPP Tegal memiliki nilai target tahunan dan capaian triwulan III tertinggi di antara semua Satker, diikuti oleh BPPP Ambon dan BPPP Banyuwangi. Untuk target PNBPN tahunan untuk semua BPPP telah terpenuhi di triwulan III.

Adapun faktor penyebab keberhasilan PNBPN pada triwulan III Tahun 2024 disebabkan oleh:

- 1) Sarana dan Prasarana di Balai Pelatihan dan Penyuluhan yang cukup memadai sehingga menarik minat pengguna jasa untuk menggunakan layanan sebagai sumber pemasukan PNBPN;
- 2) Adanya komitmen Pimpinan dalam meningkatkan PNBPN.
- 3) Tersedianya standar biaya/tarif atas PNBPN yang berlaku.
- 4) Optimalisasi workshop pelatihan dengan KPKNL atau instansi lainnya.

Kegiatan pendukung capaian Indikator PNBPN lingkup Pusat Pelatihan KP adalah sebagai berikut:

- 1) Kerjasama dengan Perusahaan penangkapan ikan, sekolah sekolah perikanan, lembaga NGO dalam perekrutan peserta pelatihan sehingga ada pemasukan PNBPN;
- 2) Identifikasi sumber sumber PNBPN lainnya di balai dan BLU;
- 3) Peningkatan kualitas layanan sarana dan prasarana dan promosi di media sosial

Indikator Kinerja IKSK.01.04 Tenaga kerja yang terlibat di Lingkup Pusat Pelatihan KP (Orang)

Tenaga kerja yang terlibat dalam sektor kelautan dan perikanan merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang/jasa maupun yang menerima manfaat/operasionalisasi dalam kegiatan prioritas fisik ataupun non fisik di sektor kelautan dan perikanan baik perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan,

pemasaran produk perikanan, pengelolaan ruang laut, pelatihan serta karantina ikan. Tenaga kerja yang terlibat langsung/tidak langsung di Bidang Pelatihan kelautan dan Perikanan diantaranya Tenaga Kerja di P2MKP.

IKU Tenaga kerja yang terlibat di Lingkup Pusat Pelatihan KP tidak memiliki target pada rencana aksi triwulan III tahun 2024. Target IK ini diukur pada periode triwulan IV dengan target tahunan sebesar 122 Orang.

Progress kegiatan yang telah dilaksanakan sampai triwulan III adalah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi Data tenaga kerja terlibat di BPPP Bitung sudah ada 16 orang tenaga kerja P2MKP.
- 2) Identifikasi data tenaga kerja P2MKP sebanyak 20 orang di BPPP Medan.
- 3) Identifikasi data tenaga kerja di BPPP Banyuwangi sebanyak 30 orang

Selanjutnya masing-masing UPT akan melengkapi dokumen data dukung capaian seperti foto geotagging dan SK Pengesahannya.

Sasaran Program SK.02 - Terselenggaranya Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja IKSK.02.01 - SDM KP yang bersertifikat kompetensi (Orang)

IKU ini merupakan indikator yang menunjukkan jumlah SDM KP yang mengikuti uji kompetensi sesuai dengan persyaratan uji kompetensi. Peserta yang mendapatkan sertifikat kompetensi adalah yang sudah dinyatakan lulus sesuai dengan persyaratan dan ujian. Sertifikat dikeluarkan oleh LSP/BNSP dan atau Lembaga Sertifikasi lainnya. Sebagai upaya pengakuan dan perlindungan atas kompetensi yang dimiliki oleh SDM KP, khususnya tenaga kerja sektor KP, maka Pusat Pelatihan KP melalui Balai Diklat pada tahun 2024 telah menetapkan target untuk melakukan sertifikasi kompetensi bagi SDM KP sebanyak 1.450 orang, Indikator kinerja utama untuk Sasaran Strategis ini adalah SDM KP yang bersertifikat kompetensi sebanyak 1.450 orang, yang dihasilkan oleh 5 (lima) BPPP.

BPPSDM sebagai bagian penting dari pembangunan kelautan dan perikanan melalui pengembangan SDM KP, sesuai tugas dan fungsinya memiliki tanggung jawab atas pencapaian IKU tersebut, dengan indikator yang hendak dicapai adalah jumlah SDM KP yang dilatih dan disuluh. Sertifikasi kompetensi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang diberi kewenangan melaksanakan Uji Kompetensi dibawah dan dibentuk oleh BNSP dan lembaga diklat yang merupakan approval untuk melakukan diklat kepelautan internasional dengan mengacu pada standar SKKNI, SK3, dan IMO Course.

Terwujudnya kompetensi SDM KP yang mendukung peningkatan produktifitas usaha dan pendapatan negara dari sektor KP melalui kegiatan sertifikat kompetensi ini bertujuan untuk memberikan pengakuan atas kompetensi yang dimiliki oleh seseorang sesuai tugas/jabatan yang dimiliki sesuai standar kompetensi yang berisi rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di samping itu, sertifikasi kompetensi ini juga memberikan manfaat kepada perlindungan tenaga kerja untuk mendapatkan remunerasi sesuai dengan level kompetensi yang dimiliki.

Tabel 16. Capaian IKU SDM KP yang bersertifikat kompetensi

| Realisasi TW III Puslatuh KP | | | | 2024 | | | | | Renstra PUSLATLUH KP 2020 – 2024 | |
|------------------------------|------|------|-------|-------------|---------------|-----------|-----------|----------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Target 2024 | Target TW III | Realisasi | % Capaian | % Kenaikan 2023-2024 | Target 2024 | % Capaian thd target 2024 |
| 120 | 180 | 403 | 1.053 | 1.450 | 853 | 1.299 | 120,00 | 23,36% | 1.450 | 89,59 |

Sumber : Data Capaian Pusat Pelatihan KP

Indikator Kinerja Utama ini didefinisikan sebagai indikator yang menunjukkan jumlah SDM KP yang diuji kompetensinya. Penghitungan dilakukan dengan cara penjumlahan dari SDM KP yang mengikuti sertifikasi kompetensi baik purnawidya pelatihan maupun dari dunia usaha, dan dunia industri. Capaian IKU SDM KP yang bersertifikat kompetensi pada triwulan III tahun 2024 sebesar 1299 orang atau sebesar 120% dari target triwulan III. Jika dibandingkan dengan target tahunannya telah mencapai 89,59%. Realisasi Triwulan III tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 23,36% jika dibanding tahun 2023 di triwulan yang sama. Berdasarkan target SDM KP yang bersertifikat kompetensi pada periode Renstra 2020-2024 sebanyak 4.308 orang, realisasi sampai dengan Triwulan 2 tahun 2024 ini adalah sebanyak 4.226 orang atau mencapai 98,09%. Adapun rekap sertifikasi kompetensi per Satker sebagaimana tabel berikut.

Tabel 17. Rekap Sertifikasi Kompetensi per Satker

| No | Balai | Target Tahunan | Target TW III | Capaian TW III | % TW III |
|----|-----------------|----------------|---------------|----------------|----------|
| 1 | BPPP MEDAN | 150 | 150 | 176 | 117,33 |
| 2 | BPPP TEGAL | 730 | 563 | 940 | 166,96 |
| 3 | BPPP BANYUWANGI | 270 | 90 | 90 | 100,00 |
| 4 | BPPP BITUNG | 150 | 50 | 93 | 186,00 |
| 5 | BPPP AMBON | 150 | 0 | 0 | - |
| | Total | 1.450 | 853 | 1299 | 120,00 |

Sumber : Data Capaian Pusat Pelatihan KP

Berdasarkan bidang kompetensinya realisasi pada triwulan III ini Budidaya sebanyak 189 orang, Perikanan Tangkap sebanyak 1009 orang dan Manajemen sebanyak 42 orang. Sertifikasi Perikanan Tangkap ini sebagian besar merupakan sertifikasi untuk awak kapal perikanan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, baik dari DJPT ataupun dari BPPSDM pasca pelimpahan kewenangan terkait sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan.

Tabel 18. Rekap IKU SDM KP yang bersertifikat kompetensi perbidang usaha

| Bidang Sertifikasi | BPPP Banyuwangi | BPPP Bitung | BPPP Medan | BPPP Tegal | BPPP Ambon | Total |
|-----------------------------------|-----------------|-------------|------------|------------|------------|-------|
| Budidaya | 66 | 42 | 26 | 55 | | 189 |
| Manajemen | | | | 42 | | 42 |
| Mesin Perikanan | | | | 1 | | 1 |
| Penangkapan Ikan | 24 | | 150 | 835 | | 1009 |
| Pengolahan & Pemasaran | | 51 | | 7 | | 58 |
| Total | 90 | 93 | 176 | 940 | 0 | 1299 |

Sumber : Data Capaian Pusat Pelatihan KP

Adapun faktor penyebab keberhasilan IKU SDM KP yang bersertifikasi kompetensi pada triwulan III Tahun 2024 disebabkan oleh:

- 1) Telah adanya approval assesor pelaksanaan uji kompetensi oleh BNSP yang diwakili oleh LSP KP;
- 2) Permen KKP No.33 tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan Di Atas Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, Dan Penandaan Kapal Perikanan, Serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan, adapun dalam Permen KKP ini untuk Sertifikat Awak Kapal Perikanan wewenang Dirjen Tangkap KKP pada Pasal 127 ayat 2-4 sudah mulai diterapkan;
- 3) Sistem ujian awak kapal perikanan telah dibuat dan terus disempurnakan bersama DJPT dan Pusdatin;

Kegiatan pendukung capaian IKU SDM KP yang bersertifikasi kompetensi pada triwulan II ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kerjasama dengan BNSP dalam kegiatan uji sertifikasi, Memperpanjang akreditasi balai pelatihan sebagai tempat TUK;
- 2) Percepatan penerbitan sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan oleh Pusat Pelatihan KP;
- 3) Melakukan pendampingan proses approval Program Diklat Awak Kapal Perikanan khususnya di Balai Pelatihan KKP.

Sasaran Program SK.03 - Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan KP

Indikator Kinerja IKSK.03.01 - Lulusan pelatihan yang membentuk start up (Orang)

Startup adalah sebuah istilah yang merujuk pada suatu bisnis atau perusahaan rintisan. Perusahaan rintisan merupakan perusahaan yang baru beroperasi dan masih berada pada fase pengembangan untuk menemukan pasar dan mengembangkan produk. Saat ini, istilah startup bisa lebih dikerucutkan lagi menjadi perusahaan rintisan yang mengacu pada bisnis berbasis teknologi. Pusat Pelatihan KP mendefinisikan IKU startup sebagai indikator yang menunjukkan jumlah lulusan pelatihan yang melakukan wirausaha dengan memanfaatkan teknologi digital dalam mengembangkan usahanya (pengembangan ekonomi digital).

Perhitungan dilakukan dengan menghitung jumlah pelaku utama lulusan pelatihan yang melakukan wirausaha dan memanfaatkan teknologi digital (media sosial dan lain sebagainya) dalam pengembangan usahanya yang dihitung melalui evaluasi pasca pelatihan sekurang-kurangnya setelah 1 siklus periode setelah dilatih.

Pusat Pelatihan KP bersama Balai Pelatihan juga melakukan koordinasi untuk menyamakan persepsi terkait manual Iku dari indikator kinerja Lulusan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan). Reviu terhadap hasil capaian IKU tahun 2024 serta sharing dan berbagi pengalaman antar balai. Selanjutnya akan dilakukan identifikasi terhadap lulusan pelatihan yang berpotensi untuk dijadikan startup berdasarkan profil usahanya dengan bantuan penyuluh perikanan di lapangan.

IK Lulusan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) tidak memiliki target pada rencana aksi triwulan III tahun 2024. Target IK ini diukur pada periode triwulan IV dengan target tahunan sebanyak 147 Orang.

Progress kegiatan yang telah dilaksanakan sampai triwulan III adalah sebagai berikut:

- 1) Pusat Pelatihan KP telah menyiapkan draft instrumen moneyv dan pedoman kegiatan moneyv yang selanjutnya akan segera difinalisasi dan disebar ke lulusan pelatihan. Instrumen yang dihasilkan nantinya akan digunakan sebagai alat untuk melakukan evaluasi pasca pelatihan untuk mengidentifikasi purnawidya yang telah melakukan wirausaha dan memanfaatkan teknologi digital.

Indikator Kinerja IKSK.03.02 - Materi Pelatihan berbasis Kaji Widya (Paket)

Salah satu Penyelenggaraan fungsi Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan berkaitan dengan upaya menjadikan sumberdaya manusia aparatur dan non aparatur sektor kelautan dan perikanan dapat berperan nyata dalam pembangunan nasional. Untuk lebih

meningkatkan mutu, efisiensi, dan efektifitas penyelenggaraan pelatihan, salah satu strategi yang ditempuh adalah secara terus menerus meningkatkan profesionalisme para pelatih.

Kebijakan penyelenggaraan pelatihan kp yang ditetapkan adalah diterapkannya kurikulum berdasarkan kompetensi kerja dimana pelaksanaan proses berlatih dan melatih dengan menggunakan Garis-Garis Besar Program Pembelajaran (GGBP) dan Satuan Acara Pembelajaran (SAP). Tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk meningkatkan mutu hasil pelatihan yang ditandai dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan serta sikap para peserta yang lebih profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Usaha untuk mencapai tujuan tersebut adalah tersedianya pelatih yang profesional, yakni pelatih yang menguasai dan mampu melatih keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan dengan lancar, berhasil guna dan berdaya guna.

Untuk meningkatkan serta mendorong tumbuhnya sikap lebih percaya diri para pelatih dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya, maka setiap pelatih di Lembaga Pelatihan perlu melaksanakan kajiwidya sesuai dengan materi yang dilatihkan. Kajiwidya adalah kegiatan pelatih untuk belajar atau berlatih sendiri, melakukan, mengamati dan menganalisis suatu penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi kerja pelatih sesuai dengan substansi mata diklat. Pelatih lembaga pelatihan terdiri dari widyaiswara, instruktur, dan widyaiswara/instruktur luar biasa.

Tahun 2024 terjadi perubahan mekanisme pelaksanaan Kajiwidya, mulai tahun ini akan dilakukan seleksi proposal dan proposal yang dianggap sesuai dan layak yang akan dibiayai untuk dilaksanakan. Pusat Pelatihan KP telah Menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan kaji widya ini, dan sudah dilakukan sosialisasi kepada BPPP dan instruktur. IK Materi Pelatihan berbasis Kaji Widya tidak memiliki target pada rencana aksi triwulan III tahun 2024. Target IK ini diukur pada periode triwulan IV dengan target tahunan sebanyak 5 Paket.

Progress kegiatan yang telah dilaksanakan sampai triwulan III adalah sebagai berikut:

- 1) Penyampaian dan penerimaan proposal kaji widya dari Balai Pelatihan ke Puslat KP.
- 2) Pendampingan proses seleksi proposal kaji widya.
- 3) Pemaparan dari masing-masing pengusul proposal Kajiwidya
- 4) Seleksi proposal.

- 5) Sudah ada 5 Proposal yang disetujui, 1 dari Bitung, 1 dari Banyuwangi, 1 dari Ambon dan 2 dari Tegal.

Sasaran Program SK.04 - Tersedianya Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pelatihan dan Penyuluhan KP

Indikator Kinerja IKSK.04.01 - Norma, Standar, Prosedur dan Kreteria Pelatihan dan Sertifikasi yang disusun (NSPK)

Ketersediaan sumberdaya manusia yang kompeten perlu diimbangi dengan tersedianya regulasi yang baik, sehingga dapat menjadi standar advokasi dalam mencermati kendala dan permasalahan dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu sangat dibutuhkan dukungan bahan yang komprehensif serta input yang terintegrasi melalui pentahapan proses pembahasan dan penyelesaiannya khususnya dalam memberikan dasar yang kuat untuk melakukan kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan kelautan dan perikanan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta dapat memberikan sumbangan terhadap pengurangan pengentasan kemiskinan.

Regulasi/Panduan/Pedoman/NSPK dan Administrasi terkait standarisasi kompetensi kerja bagi tenaga kerja Indonesia, khususnya tenaga kerja di bidang kelautan dan perikanan yang akan berimplikasi pada daya saing dunia usaha dan perekonomian. Selain itu Sertifikasi kompetensi kerja merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyusun Regulasi/Panduan/Pedoman/NSPK dan Administrasi terkait Sertifikasi kompetensi atau tenaga kerja yang telah atau tenaga kerja yang berpengalaman. Selain itu aturan dan pedoman untuk penyusunan Modul dan kurikulum pelatihan aparatur dan pelatihan Masyarakat KP.

Telah dilakukan rapat-rapat penyusunan draft atas peraturan yang akan dihasilkan pada tahun ini. Rapat penyusunan dilakukan internal di lingkup Pusat Pelatihan KP ataupun melibatkan stakeholder lain untuk mendapatkan masukan atas draft yang disusun.

IK Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang disusun tidak memiliki target pada rencana aksi triwulan III tahun 2024. Target IK ini diukur pada periode triwulan IV dengan target tahunan sebanyak 4 NSPK.

Progress kegiatan yang telah dilakukan pada triwulan III ini adalah sebagai berikut:

- 1) Harmonisasi PermenKP tentang Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan, draft sudah di Kemenkumham.
- 2) Harmonisasi RanPermen tentang Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat Sektor Kelautan dan Perikanan dan bersurat ke Kemenkumham.

- 3) Pembahasan Standar Mutu Penyelenggaraan Pelatihan, Ujian dan Sertifikasi Keahlian Awak Kapal Perikanan melalui Skema Portofolio, Pengakuan dan Penghargaan atas Pengalaman Berlayar diatas Kapal Perikanan.
- 4) Harmonisasi KKNi dengan Kemenkumham akan dimulai lagi di Oktober
- 5) Proses PermenKP Nomor 23 akan dimulai lagi di Oktober

Indikator Kinerja IKS.04.02 - Kelembagaan Pelatihan yang tersertifikasi sesuai standar lembaga pelatihan (Lembaga)

Indikator Kinerja Utama ini didefinisikan sebagai indikator yang menunjukkan jumlah Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan dan Penyuluhan yang masih berlangsung. Lembaga pelatihan seperti akreditasi ISO dan pemeliharaan sistem mutu pelatihan. Sertifikasi Lembaga pelatihan dan penyuluhan seperti asesment mandiri, akreditasi ISO dan pemeliharaan sistem mutu pelatihan. Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan dan Penyuluhan dikeluarkan oleh Lembaga luar yang memiliki kompetensi dan kewenangan mengeluarkan sertifikat Akreditasi.

Lembaga pelatihan yang terstandar merupakan langkah strategis dalam rangka menjamin mutu dan meningkatkan layanan pelatihan. Upaya tersebut ditempuh dengan melakukan standardisasi seluruh proses penyelenggaraan pelatihan, meliputi standardisasi: program, lulusan, evaluasi, biaya, proses, ketenagaan, serta standardisasi sarana dan prasarana pelatihan KP.

Dengan sistem manajemen mutu (QMS) yang efektif ini, maka Balai memiliki akan struktur yang lebih jelas, pendekatan sistematis untuk meningkatkan layanan kepada setiap peserta latih, serta membantu untuk pengendalian dan proses pencapaian tujuan organisasi. Dengan akreditasi QMS ini juga akan memberikan manfaat kepada Balai untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelatihan, meningkatkan kepuasan pelanggan, mengurangi tingkat kesalahan yang mengarah pada peningkatan produktivitas Balai.

Balai Pelatihan dan Penyuluhan KP sejak tahun 2017 telah terakreditasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, Dimana terdapat 7 karakteristik utama yaitu; pendekatan pro aktif, integrasi mutu ke dalam proses bisnis, performance, mengikuti siklus PDCA, penyesuaian lingkup dengan komitmen organisasi, bersifat sukarela, dan relevan dengan tugas dan fungsi Balai. Dengan akreditasi ini telah memberikan manfaat nyata kepada balai dalam peningkatan kepuasan layanan kepada peserta latih, seperti pembuatan Pelayanan Pelatihan Terpadu satu Pintu (PTSP) di beberapa balai, pengurangan biaya pelatihan tanpa mengurangi mutu penyelenggaraan pelatihan dan

mutu lulusan pelatihan, serta mampu mengurangi permasalahan atau sengketa antara bagian dan memberikan rekomendasi atas permasalahan yang dihadapi.

IK Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan sesuai standar lembaga pelatihan tidak memiliki target pada rencana aksi triwulan III tahun 2024. Target IK ini diukur pada periode triwulan IV dengan target tahunan sebanyak 7 Lembaga.

Progress kegiatan yang telah dilakukan pada triwulan III ini adalah sebagai berikut:

- 1) Telah dilaksanakan audit terkait standar mutu penyelenggaraan pelatihan kepada Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan.
- 2) Audit lapangan ke Pusat pelatihan KP dan Balai untuk penilaian ISO Pusat Pelatihan KP dan BPPP Medan, BPPP Tegal, BPPP Banyuwangi, BPPP Bitung, BPPP Ambon dan BDA Sukamandi. Audit ini dilaksanakan oleh TUV Reinland selaku instansi yang akan mengeluarkan sertifikat penjamin mutu di lingkup Pusat pelatihan KP.
- 3) Sertifikat ISO sudah berproses dan akan segera diterima oleh Pusat Pelatihan KP.

Indikator Kinerja IKSK.04.03 - Persentase Usulan Sertifikasi Program Diklat Masyarakat Bidang Kelautan dan Perikanan yang disahkan sesuai dengan Peraturan yang berlaku (%)

IKU ini didefinisikan indikator yang menunjukkan jumlah Sertifikasi Program Diklat Masyarakat Bidang Bidang Kepelautan dan Perikanan, adapun sertifikasi dilakukan oleh Lembaga Approval Lembaga Diklat yang ditetapkan oleh Kepala BPPSDMKP. Formula Perhitungan IKU ini yakni jumlah sertifikasi program diklat masyarakat bidang teknis kelautan dan perikanan. Bukti dukung dari IKU ini antara lain sertifikat approval Program Diklat Masyarakat Teknis Bidang Kepelautan dan Perikanan yang telah disahkan oleh pimpinan.

IK Persentase Usulan Sertifikasi Program Diklat Masyarakat Bidang Kelautan dan Perikanan yang disahkan sesuai dengan Peraturan yang berlaku tidak memiliki target pada rencana aksi triwulan III tahun 2024. Target IK ini diukur pada periode triwulan IV dengan target tahunan sebanyak 75%.

Progress kegiatan yang telah dilakukan pada triwulan III ini adalah sebagai berikut:

- 1) Sudah terbit SK Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP tentang Komite Approval Program Diklat Awak Kapal Perikanan;
- 2) Identifikasi Lembaga Diklat yang mengusulkan approval Lembaga diklat awak Kapal Perikanan;
- 3) Sosialisasi dari LAN untuk Bimtek pengaudit Lembaga diklat bagi calon calon auditor yang akan melaksanakan proses audit program diklat kelautan dan perikanan;

- 4) Rapat Komite Approval untuk membuat rencana kerja tahun 2024

Indikator Kinerja IKSK.04.04 - Jejaring dan/atau kerjasama lingkup Pusat Pelatihan KP yang disepakati dan ditindaklanjuti (Dokumen)

IK ini merupakan indikator yang menunjukkan jumlah jejaring dan/atau kerjasama yang diinisiasi oleh Pusat Pelatihan KP maupun UPT Pelatihan dengan instansi/institusi lain yang telah disepakati terkait kegiatan pelatihan dengan instansi/institusi lain yang telah disepakati dalam bentuk Kepmen, SK, MOU, dan atau KAK yang sudah di tandatangani. IKU dari sasaran strategis terselenggaranya kegiatan pelatihan KP yang mendukung terwujudnya kedaulatan dan keberlanjutan ini menggambarkan inisiasi kerja sama yang telah dilakukan oleh Pusat Pelatihan KP yang bertujuan meningkatkan kinerja organisasi, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan pelatihan dan sebagai upaya lanjutan dari output yang telah dihasilkan untuk menjadi *input* pada proses selanjutnya.

Pada triwulan III tahun 2024 ini capaian untuk jumlah jejaring dan/atau kerjasama Pusat Pelatihan KP sudah ada capaian 10 PKS dengan target triwulan III sebanyak 10 PKS (100%) dari target tahunan sebanyak 12 PKS (83,33%). Realisasi triwulan III tahun 2023 sebesar 16 kerjasama sehingga jika dibandingkan dengan tahun 2023 adanya penurunan sebesar 37,5%.

Adapun faktor penyebab keberhasilan IK Jejaring dan/atau kerjasama lingkup Pusat Pelatihan KP yang disepakati dan ditindaklanjuti triwulan III Tahun 2024 disebabkan oleh::

- 1) Kerjasama dengan Intansi terkait lainnya, Pemerintah daerah dan NGO pada awal tahun ;
- 2) Pemenuhan SDM Tenaga Pelatih;
- 3) Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelatihan.
- 4) Adanya kepentingan dan atau tujuan yang sama dengan organisasi lain.

Kegiatan pendukung capaian IK Jejaring dan/atau kerjasama lingkup Pusat Pelatihan KP yang disepakati dan ditindaklanjuti adalah dengan melakukan koordinasi dan komunikasi intens dengan pihak terkait yang berpotensi dan kepentingan untuk dilakukan Kerjasama dalam upaya peningkatan peran pelatihan KP serta memperluas jangkauan pelayanan kepada Masyarakat.

Tabel 19. Capaian IKU Jejaring dan/atau kerjasama lingkup Pusat Pelatihan KP yang disepakati dan ditindaklanjuti.

| Realisasi TW III Puslatluh KP | | | | 2024 | | | | | Renstra PUSLATLUH KP 2020 – 2024 | |
|-------------------------------|------|------|------|-------------|---------------|-----------|-----------|----------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Target 2024 | Target TW III | Realisasi | % Capaian | % Kenaikan 2023-2024 | Target 2024 | % Capaian thd target 2024 |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|----|---|----|----|----|----|--------|---------|----|-------|
| 2 | 13 | 7 | 16 | 12 | 10 | 10 | 100,00 | -37,50% | 12 | 83,33 |
|---|----|---|----|----|----|----|--------|---------|----|-------|

Sumber : Data Capaian Pusat Pelatihan KP

Tabel 20. Rekap Capaian IKU Jejaring dan/atau kerjasama lingkup Pusat Pelatihan KP

| No | KERJASAMA | Judul Kerjasama | Nomor perjanjian kerjasama | JANGKA WAKTU | |
|----|---|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | MULAI | BERAKHIR |
| 1 | Pusat Pelatihan KP dengan Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia | Peningkatan kapasitas dan sertifikasi pekerja pengolahan tuna | 42/BPPSDM/KKP/PKS/VIII/2024 | 28 Agustus 2024 | 28 Agustus 2027 |
| 2 | BPPP Tegal dengan Asosiasi Pekerja Perikanan Indonesia (AP2I) | Peningkatan Kompetensi Bidang Kepelautan Bagi awak kapal Perikanan | 22/BPPSDM/KKP/PKS/III/2024 | 15 Maret 2024 | 15 Maret 2027 |
| 3 | BPPP Tegal dengan Jejaring Laboratorium Pengujian Penyakit dan Mutu Keamanan hasil Perikanan (JLPPMHP) Jawa Timur | Pelatihan, Pemagangan dan Sertifikasi | 7/BPPSDM/KKP/PKS/II/2024 | 16 Februari 2024 | 16 Februari 2027 |
| 4 | BPPP Tegal dengan CV, Waluyo Dokpel Indonesia | Peningkatan Kompetensi Bidang Kepelautan Bagi Calon Awak kapal Perikanan | 12/BPPSDM/KKP/PKS/II/2024 | 29 Februari 2024 | 28 Februari 2027 |
| 5 | BPPP Tegal dengan Tiga Diva Sinergi Bersama | Pelatihan, Pemagangan dan Sertifikasi | 21/BPPSDM/KKP/PKS/III/2025 | 15 Maret 2024 | 15 Maret 2027 |
| 6 | BPPP Tegal dengan PT Jasuma Anugerah Prima Sejahtera | Peningkatan Kompetensi Bidang Kepelautan bagi Awak Kapal Perikanan | 30/BPPSDM/KKP/PKS/VI/2024 | 05 Juni 2024 | 05 Juni 2027 |
| 7 | Balai Pengembangan Penjamin Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan BPPP Tegal | Penyelenggaraan Peningkatan Kompetensi Guru Produktif Berstandar Industri | 22/BPPSDM/KKP/PKS/II/2024 | 20 Februari 2024 | 20 Februari 2027 |
| 8 | BPPP Tegal dengan Koperasi Mitra Nelayan Samudra | Peningkatan Kompetensi Bidang Kepelautan bagi Nakhoda Kapal Perikanan | 28/BPPSDM/KKP/PKS/VIII/2024 | 02 Juni 2024 | 02 Juni 2027 |
| 9 | BPPP Tegal dengan PT Nusantara Daulat Sejati | Peningkatan kompetensi bidang kepelautan bagi calon awak kapal | 29/BPPSDM/KKP/PKS/VI/2024 | 03 Juni 2024 | 03 Juni 2027 |
| 10 | BPPP Tegal dengan PT RNT Utama Indonesia | Peningkatan kompetensi bidang kepelautan bagi awak calon kapal perikanan | 54/BPPSDM/KKP/PKS/IX/2023 | 20 September 2024 | 20 September 2027 |

Sumber : Data Capaian Pusat Pelatihan KP

Sasaran Program SK.05 - Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja IKSK.05.01 - Sarana Pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)

Peningkatan kapasitas sarana yang berbentuk pengadaan fisik dan non fisik/belanja modal yang dilaksanakan oleh satuan kerja lingkup Pusat Pelatihan KP. Pengadaan fisik dan nonfisik yang diadakan sesuai dengan yang sudah disetujui dan tertuang dalam dokumen perencanaan kerja Satker. Perhitungan pada Indikator Kinerja Utama ini dilakukan dengan cara menjumlahkan sarana yang terbentuk pengadaan fisik/belanja modal.

IK Sarana Pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya tidak memiliki target pada rencana aksi triwulan III tahun 2024. Target IK ini diukur pada periode triwulan IV dengan target tahunan sebanyak 6 Unit.

Progress kegiatan yang telah dilakukan pada triwulan III ini adalah sebagai berikut:

- 1) BPPP Medan telah selesai pengadaan kendaraan operasional roda 4;
- 2) BPPP Tegal dalam proses pengadaan sarana layanan pelatihan.
- 3) BPPP Banyuwangi dalam proses pengadaan perlengkapan pendukung pelatihan dan pengadaan peralatan workshop kepelautan.
- 4) BPPP Bitung telah selesai pengadaan AC, meubelier, dan pengadaan peralatan mesin pendukung layanan publik.
- 5) BPPP Ambon sudah selesai pengadaan sarana pendingin ruangan dan perkantoran, sarana pelayanan publik dan sarana workshop budidaya.

Indikator Kinerja IKSK.05.02 - Prasarana Pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)

Peningkatan kapasitas Prasarana yang berbentuk pengadaan fisik dan non fisik/belanja modal yang dilaksanakan oleh satuan kerja lingkup Pusat Pelatihan KP. Pengadaan fisik dan nonfisik yang diadakan sesuai dengan yang sudah disetujui dan tertuang dalam dokumen perencanaan kerja Satker. Perhitungan pada Indikator Kinerja Utama ini dilakukan dengan cara menjumlahkan prasarana yang terbentuk pengadaan fisik/belanja modal. IK Prasarana Pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya tidak memiliki target pada rencana aksi triwulan III tahun 2024.

IK Prasarana Pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya tidak memiliki target pada rencana aksi triwulan III tahun 2024. Target IK ini diukur pada periode triwulan IV dengan target tahunan sebanyak 5 Unit.

Progress kegiatan yang telah dilakukan pada triwulan III ini adalah sebagai berikut::

- 1) BPPP Medan telah selesai pengadaan renovasi gedung PTSP;

- 2) BPPP Banyuwangi proses pengadaan renovasi asrama pelatihan.
- 3) BPPP Bitung telah selesai renovasi asrama pelatihan.
- 4) BPPP tegal proses pengerjaan rehab asrama.
- 5) BPPP Ambon telah selesai renovasi kantor induk.

Sasaran Program SK.06 - Aparatur KP yang Dididik dan dilatih

Indikator Kinerja IKSK.06.01 - Aparatur KP yang dilatih (Orang)

Aparatur dituntut untuk meningkatkan kualitasnya melalui pengembangan Jalur lain dari pengembangan kompetensi seperti pelatihan. Pelatihan (training) merupakan proses pendidikan jangka pendek dengan menggunakan prosedur sistematis dan terorganisasi di mana pegawai mempelajari pengetahuan dan keterampilan teknis. Pelatihan untuk pengembangan kompetensi ASN dibagi dalam dua bentuk, yakni pelatihan klasikal dan pelatihan nonklasikal. Pelatihan klasikal menekankan pada kegiatan pembelajaran tatap muka dalam kelas, seperti pelatihan struktural, seminar, lokakarya, kursus, dsb. Sementara pelatihan nonklasikal menekankan pada proses pembelajaran praktik kerja dan/atau pembelajaran di luar kelas, seperti coaching, mentoring, e-learning. Belakangan pelatihan nonklasikal mendominasi pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN.

Indikator yang menunjukkan jumlah Aparatur KP yang telah dilatih. Aparatur KP yang dilatih merupakan indikator yang menunjukkan jumlah Aparatur Sipil KP yang telah dilatih, dengan kriteria sebagai berikut :

- 1) Menggunakan dana APBN,
- 2) Diselenggarakan secara tatap muka (klasikal), daring (non klasikal) atau Blended Training,
- 3) Menggunakan modul dan kurikulum yang telah ditetapkan oleh Pusat Pelatihan dan Penyuluhan serta Lembaga/Otoritas yang kompeten.

Adapun untuk perhitungannya, IKU ini menghitung Jumlah Aparatur KP yang telah mengikuti pelatihan reguler, pelatihan teknis dan pelatihan dengan metode blended training maupun fullonline training dan dinyatakan lulus Diklat serta mendapatkan sertifikat Diklat.

Target kinerja triwulan III tahun 2024 ini sebanyak 4.300 orang, dan realisasi mencapai 5.120 orang (119,07%). Bila dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 5.165, realisasi sudah mencapai 99,13%. Jika dibandingkan dengan capaian triwulan III tahun 2023 sebanyak 4.136 orang maka terjadi peningkatan sebanyak 23,79%. Apabila melihat target Renstra 2020-2024 kumulatif sebesar 22.690 orang, sampai triwulan II tahun 2024 ini sudah tercapai sebanyak 30.028 orang atau 132,34%.

Tabel 21. Capaian IKU Aparatur KP yang dilatih

| Realisasi TW III Puslatluh KP | | | | 2024 | | | | | Renstra PUSLATLUH KP 2020 – 2024 | |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------------|---------------|-----------|-----------|----------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Target 2024 | Target TW III | Realisasi | % Capaian | % Kenaikan 2023-2024 | Target 2024 | % Capaian thd target 2024 |
| 2.430 | 3.669 | 3.703 | 4.136 | 5.165 | 4.300 | 5.120 | 119,07 | 23,79% | 5.165 | 99,13 |

Sumber : Data Capaian Pusat Pelatihan KP

Adapun faktor penyebab keberhasilan IKU Aparatur KP yang dilatih pada triwulan III Tahun 2024 disebabkan oleh:

1. Pelatihan melalui aplikasi e-milea sehingga bisa online ke semua ASN KKP
2. Eselon I Teknis pada awal tahun sudah berkoordinasi dengan BDA Sukamandi mengenai Diklat Teknis yang akan dilaksanakan
3. Tersedianya sarana pokok dan penunjang penyelenggaraan diklat,
4. Widyaiswara yang telah memiliki sertifikat ToT sesuai bidang diklat yang dilatihkan, dan tersedianya perangkat kurikulum dan modul pelatihan, serta telah terakreditasinya program diklat kepemimpinan tingkat III dan IV, serta diklat prajabatan di BDA Sukamandi oleh LAN-RI.

Upaya yang dilakukan dalam peningkatan kompetensi ASN KP yakni pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pra-jabatan maupun pendidikan dan pelatihan dalam jabatan, seperti Diklat Struktural, Diklat Fungsional, dan Diklat Teknis/manajerial dengan melakukan kerjasama dan sinkronisasi dengan Eselon 1 KKP dalam Identifikasi kebutuhan diklat yang akan dilaksanakan.

Indikator Kinerja IKSK.06.02 - Akreditasi Lembaga Penyelenggara Diklat Aparatur (Lembaga)

IKU Akreditasi Lembaga Penyelenggara Diklat Aparatur merupakan indikator yang menunjukkan jumlah Akreditasi Program Diklat Aparatur dan Lembaga Diklat Bidang Kelautan dan Perikanan dimana proses akreditasi dilakukan oleh Lembaga Approval Lembaga Diklat yang berwenang seperti LAN. Formula penghitungan IKU ini yakni berdasarkan umlah Akreditasi Lembaga Diklat bagi ASN dan bukti dukung berupa Sertifikat Approval Lembaga dan atau Program Diklat ASN (Teknis, Manajerial dan Sosio Kultural) Bidang Bidang Kepelautan dan Perikanan yang telah disahkan oleh pimpinan. IK Akreditasi Lembaga Penyelenggara Diklat Aparatur tidak memiliki target pada rencana aksi triwulan III tahun 2024. Target IK ini diukur pada periode triwulan IV dengan target tahunan sebesar 1 Lembaga.

Progress kegiatan yang telah dilaksanakan sampai triwulan III adalah sebagai berikut:

- 1) Telah dilaksanakan penilaian untuk Akreditasi Program Diklat Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) yang merupakan program pengembangan kompetensi yang ditujukan dalam rangka pemenuhan kompetensi kepemimpinan kinerja, untuk menjamin terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan tugas dan fungsi serta kewenangan jabatan administrator;
- 2) Telah dilaksanakan penilaian untuk Akreditasi Program Diklat Pelatihan Kepemimpinan Pengawasan (PKP) yang merupakan pelatihan struktural kepemimpinan bagi Pejabat Pengawas sebagaimana diatur dalam peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022.
- 3) Sertifikat akreditasi Program Diklat PBJ juga sudah diterima oleh BPPA Sukamandi. Dokumentasinya masih dalam proses pengumpulan sebagai data dukung capaian IKU ini di TW 4.

Indikator Kinerja IKSK.06.03 - Persentase partisipasi unit organisasi dalam rangka implementasi Corporate University di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (%)

IKU ini didefinisikan sebagai indikator untuk menunjukkan implementasi Penyelenggaraan Fungsi Corporate University Kementerian KP. Formula perhitungan dari IKU ini yakni % Jumlah Laporan Penyelenggaraan fungsi Corporate University KKP di lingkup KKP dengan bukti dukung berupa dokumen laporan implementasi penyelenggaraan fungsi Corporate University Kementerian KP yang telah disahkan oleh pimpinan.

IK Persentase partisipasi unit organisasi dalam rangka implementasi Corporate University di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak memiliki target pada rencana aksi triwulan III tahun 2024. Target IK ini diukur pada periode triwulan IV dengan target tahunan sebesar 10%.

Progress kegiatan yang telah dilaksanakan sampai triwulan III adalah sebagai berikut:

- 1) Telah diusulkan izin Prakarsa Rancangan Keputusan Menteri tentang *Corporate University* Kementerian Kelautan dan Perikanan dari Kepala BPPSDM KP kepada Menteri Kelautan dan Perikanan KP;
- 2) Rapat koordinasi dengan PRL terkait penyusunan perencanaan penyelenggaraan pelatihan klasikal dan non klasikal. BPPA Sukamandi sedang menyiapkan data dukung untuk capaian IKU Corpu dan membuat laporan dalam implementasi Corpu yang telah dicanang oleh PRL.

Indikator Kinerja IKSK.06.04 - Lembaga/ Instansi yang memanfaatkan fungsi pelayanan Peningkatan Kompetensi ASN Kelautan dan Perikanan (Lembaga)

IKU ini didefinisikan sebagai indikator untuk menunjukkan terkait Lembaga/ Instansi yang memanfaatkan fungsi pelayanan Peningkatan Kompetensi ASN Kelautan dan Perikanan. Lembaga yang dimaksud merupakan lembaga pemerintah/swasta diluar unit Kerja Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Formula perhitungan IKU ini yakni jumlah Lembaga/ Instansi yang memanfaatkan fungsi pelayanan Peningkatan Kompetensi ASN Kelautan dan Perikanan. Bukti dukung IK ini berupa rekapitulasi data Lembaga/Instansi yang memanfaatkan fungsi pelayanan Peningkatan Kompetensi ASN Kelautan dan Perikanan.

IK Lembaga/ Instansi yang memanfaatkan fungsi pelayanan Peningkatan Kompetensi ASN Kelautan dan Perikanan tidak memiliki target pada rencana aksi triwulan III tahun 2024. Target IK ini diukur pada periode triwulan IV dengan target tahunan sebesar 5 Lembaga.

Progress kegiatan yang telah dilaksanakan sampai triwulan III adalah mengidentifikasi Lembaga/instansi diluar KKP (baik Kementerian Lembaga Lain maupun Pemerintah Daerah) yang memanfaatkan e-milea untuk mengikuti pelatihan teknis kelautan dan perikanan, maupun pelatihan-pelatihan lain yang berbayar atau menghasilkan PNBP. Saat ini sudah ada beberapa Lembaga yang bekerjasama dengan BPPA Sukamandi dalam penyelenggaraan Diklat khususnya Diklat yang berbayar/PNBP. BPPA Sukamandi sedang menyiapkan data dukung untuk menjadi capaian IKU di TW IV.

Sasaran Program SK.07 - Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker

Indikator Kinerja IKSK.07.01 - Persentase layanan dukungan manajemen internal Pusat Pelatihan KP

(%)

Indikator Kinerja ini merupakan Layanan Dukungan Manajemen Internal meliputi antara lain layanan perencanaan dan penganggaran internal, layanan umum, layanan hukum, layanan organisasi dan tata kelola internal, layanan kehumasan dan protokoler, layanan data dan informasi, layanan monev (termasuk pelaporan), pengelolaan keuangan dan kinerja internal, dan layanan perkantoran. Formula indikator kinerja ini A. Jumlah target dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) adalah jumlah dokumen hasil layanan yang direncanakan berdasarkan kegiatan dukungan manajemen yang dilaksanakan pada tahun berjalan. B. Jumlah realisasi dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) adalah jumlah dokumen hasil layanan yang telah disusun dan

diketahui pimpinan (di tandatangani) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen pada tahun berjalan. C. Dokumen hasil layanan dapat berupa laporan, matrik, screen shoot aplikasi yang bukan merupakan bukti capaian IKU lain. Presentase dokumen layanan manajemen yang tersedia / dibandingkan total dokumen layanan manajemen yang ditargetkan.

Capaian triwulan III Tahun 2024 sebesar 78,33% dari target triwulan III sebesar 75%. dibandingkan dengan tahun 2023 terjadi penurunan sedikit dari realisasi capaian sebesar 2,09%.

Tabel 22. Capaian IKU Persentase layanan dukungan manajemen internal Pusat Pelatihan KP

| Realisasi TW III Puslatluh KP | | | | 2024 | | | | | Renstra PUSLATLUH KP 2020 – 2024 | |
|-------------------------------|-------|-------|------|-------------|---------------|-----------|-----------|----------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Target 2024 | Target TW III | Realisasi | % Capaian | % Kenaikan 2023-2024 | Target 2024 | % Capaian thd target 2024 |
| | 73,91 | 63,00 | 80 | 100 | 75,00 | 78,33 | 104,44 | -2,09% | 100 | 78,33 |

Sumber : Data Capaian Pusat Pelatihan KP

Untuk bukti capaian IKU ini diperoleh Dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal satker antara lain Dokumen Perencanaan Anggaran 2025, dokumen revisi perencanaan anggaran 2024, dokumen perencanaan kinerja, dokumen reuiu renstra, dokumen laporan kinerja, dokumen laporan SPIP, dokumen realisasi anggaran, dokumen laporan PNBPN, dokumen weekly report, laporan keuangan, laporan BMN, laporan PM SAKIP, dan laporan PIPK Tahun 2024.

Tabel 23. Rekap Dokumen Dukungan Manajemen Internal Pusat Pelatihan KP

| No. | Nama Dokumen | Periode Pelaporan | Target Jumlah Dokumen (Tahunan) | Jumlah Dokumen (Triwulan III) |
|-----|--|-------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Dokumen Perencanaan Anggaran 2025 | | | |
| | 1) Dokumen Ranwal 2025 | Tahunan | 1 | 1 |
| | 2) Dokumen Renja Indikatif 2025 | Tahunan | 1 | 1 |
| | 3) Dokumen Renja Definitif 2025 | Tahunan | 1 | |
| 2 | Dokumen Revisi Perencanaan Anggaran 2024 | | | |
| | 1) Dokumen Revisi Anggaran 2024 | Tahunan | 1 | 1 |
| 3 | Dokumen Perencanaan Kinerja | | | |
| | 1) Perjanjian Kinerja | Tahunan | 1 | 1 |
| | 2) Rencana Aksi | Tahunan | 1 | 1 |
| | 3) Rincian Target IKU | Tahunan | 1 | 1 |
| | 4) Manual IKU | Tahunan | 1 | 1 |
| | 5) Cascading IKU | Tahunan | 1 | 1 |
| 4 | Dokumen Reuiu Renstra | Tahunan | 1 | 1 |
| 5 | Dokumen Laporan Kinerja | | | |

| No. | Nama Dokumen | Periode Pelaporan | Target Jumlah Dokumen (Tahunan) | Jumlah Dokumen (Triwulan III) | |
|----------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|
| | 1) | LKj Triwulan IV Tahun 2023 | Triwulan | 1 | 1 |
| | 2) | LKj Triwulan I Tahun 2024 | Triwulan | 1 | 1 |
| | 3) | LKj Triwulan II Tahun 2024 | Triwulan | 1 | 1 |
| | 4) | LKj Triwulan III Tahun 2024 | Triwulan | 1 | |
| 6 | Dokumen Laporan SPIP | | Mingguan | | |
| | 1) | Laporan SPIP Triwulan IV Tahun 2023 | Triwulan | 1 | 1 |
| | 2) | Laporan SPIP Triwulan I Tahun 2024 | Triwulan | 1 | 1 |
| | 3) | Laporan SPIP Triwulan II Tahun 2024 | Triwulan | 1 | 1 |
| | 4) | Laporan SPIP Triwulan III Tahun 2024 | Triwulan | 1 | |
| 7 | Dokumen Realisasi Anggaran | | Bulanan | | |
| | 1) | Realisasi Anggaran Bulan Januari | Bulanan | 1 | 1 |
| | 2) | Realisasi Anggaran Bulan Februari | Bulanan | 1 | 1 |
| | 3) | Realisasi Anggaran Bulan Maret | Bulanan | 1 | 1 |
| | 4) | Realisasi Anggaran Bulan April | Bulanan | 1 | 1 |
| | 5) | Realisasi Anggaran Bulan Mei | Bulanan | 1 | 1 |
| | 6) | Realisasi Anggaran Bulan Juni | Bulanan | 1 | 1 |
| | 7) | Realisasi Anggaran Bulan Juli | Bulanan | 1 | 1 |
| | 8) | Realisasi Anggaran Bulan Agustus | Bulanan | 1 | 1 |
| | 9) | Realisasi Anggaran Bulan September | Bulanan | 1 | 1 |
| | 10) | Realisasi Anggaran Bulan Oktober | Bulanan | 1 | |
| | 11) | Realisasi Anggaran Bulan November | Bulanan | 1 | |
| | 12) | Realisasi Anggaran Bulan Desember | Bulanan | 1 | |
| 8 | Dokumen Laporan PNBP | | Bulanan | | |
| | 1) | Bulan Januari | Bulanan | 1 | 1 |
| | 2) | Bulan Februari | Bulanan | 1 | 1 |
| | 3) | Bulan Maret | Bulanan | 1 | 1 |
| | 4) | Bulan April | Bulanan | 1 | 1 |
| | 5) | Bulan Mei | Bulanan | 1 | 1 |
| | 6) | Bulan Juni | Bulanan | 1 | 1 |
| | 7) | Bulan Juli | Bulanan | 1 | 1 |
| | 8) | Bulan Agustus | Bulanan | 1 | 1 |
| | 9) | Bulan September | Bulanan | 1 | 1 |
| | 10) | Bulan Oktober | Bulanan | 1 | |
| | 11) | Bulan November | Bulanan | 1 | |

| No. | Nama Dokumen | Periode Pelaporan | Target Jumlah Dokumen (Tahunan) | Jumlah Dokumen (Triwulan III) |
|-----------|---|-------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| | 12) Bulan Desember | Bulanan | 1 | |
| 9 | Dokumen Weekly Report | Mingguan | | |
| | 1) Bulan Januari | Mingguan | 1 | 1 |
| | 2) Bulan Februari | Mingguan | 1 | 1 |
| | 3) Bulan Maret | Mingguan | 1 | 1 |
| | 4) Bulan April | Mingguan | 1 | 1 |
| | 5) Bulan Mei | Mingguan | 1 | 1 |
| | 6) Bulan Juni | Mingguan | 1 | 1 |
| | 7) Bulan Juli | Mingguan | 1 | 1 |
| | 8) Bulan Agustus | Mingguan | 1 | 1 |
| | 9) Bulan September | Mingguan | 1 | 1 |
| | 10) Bulan Oktober | Mingguan | 1 | |
| | 11) Bulan November | Mingguan | 1 | |
| | 12) Bulan Desember | Mingguan | 1 | |
| 10 | Laporan Keuangan | Semester | | |
| | 1) Semester II Tahun 2023 | Semester | 1 | 1 |
| | 2) Semester I Tahun 2024 | Semester | 1 | 1 |
| 11 | Laporan BMN | Semester | | |
| | 1) Data BMN Puslat Semester II Tahun 2023 | Semester | 1 | 1 |
| | 2) Data BMN Puslat Semester I Tahun 2024 | Semester | 1 | 1 |
| 12 | Laporan PM SAKIP | Tahunan | 1 | 1 |
| 13 | Laporan PIPK Tahun 2024 | Tahunan | 1 | |
| | | Jumlah | 60 | 47 |
| | | % | 100 | 78,33 |

Sumber : Data Capaian Pusat Pelatihan KP

Faktor Keberhasilan kegiatan ini yaitu adanya koordinasi internal yang baik antar tim kerja Pusat Pelatihan KP terutama dalam penyediaan dokumen-dokumen dukungan manajemen instansi yang tepat waktu.

Kegiatan pendukung capaian IKU Persentase layanan dukungan manajemen internal Pusat Pelatihan KP pada triwulan III ini adalah sebagai berikut

- 1) Monitoring pemenuhan dokumen bulanan, triwulanan dan semesteran.
- 2) Komitmen pegawai dan pimpinan dalam pemenuhan output dokumen untuk capaian IKU ini.

Indikator Kinerja IKSK.07.02 - Unit kerja lingkup Pusat Pelatihan KP yang lolos penilaian WBK, Tim Penilai Internal KKP (Satker)

Birokrasi sebagai pelaksana tugas pemerintah terus melakukan perubahan dalam mencapai sasaran Reformasi Birokrasi dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Agar masyarakat merasakan hasil percepatan Reformasi Birokrasi yang telah dilakukan pemerintah, terutama pada unit kerja, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri tersebut merupakan acuan bagi instansi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Selain itu, Peraturan Menteri tersebut merupakan rujukan untuk memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Perpres Stranas PK), terdapat tiga sektor prioritas pencegahan korupsi yaitu, perijinan dan tata niaga; keuangan negara; dan penegakan hukum dan Reformasi Birokrasi. Salah satu sub aksi pada sektor penegakan hukum dan Reformasi Birokrasi adalah tentang pembangunan Zona Integritas. Pembangunan Zona Integritas dianggap sebagai role model Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Dengan demikian pembangunan Zona Integritas menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di pemerintahan.

Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan dan pengelolaan unit kerja yang telah membangun Zona Integritas maka diperlukan revisi atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Revisi Peraturan Menteri ini mengatur lebih detail tentang mekanisme pelaksanaan pembangunan unit kerja yang telah membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Salah satu prinsip dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah akuntabilitas, dimana akuntabilitas adalah sebagai salah satu wujud komitmen Pusat Pelatihan KP dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran dan

pengendalian sumberdaya dalam penyelenggaraan pelatihan pada akhir periode pengukuran.

IK Unit kerja lingkup Pusat Pelatihan KP yang lolos penilaian WBK, Tim Penilai Internal KKP tidak memiliki target pada rencana aksi triwulan III tahun 2024. Target IK ini diukur pada periode triwulan IV dengan target tahunan sebesar 1 Satker. Pada triwulan III Tahun 2024 telah dilakukan pendampingan oleh Inspektorat Jenderal I KKP dalam hal pemenuhan dokumen dokumen yang diperlukan untuk lolos dalam penilaian WBK. BPPP Bitung telah menyelesaikan perbaikan perbaikan dokumen untuk data dukung pemenuhan penilaian WBK. Saat ini proses kita masih menunggu pelaksanaan pleno yang rencananya akan dilaksanakan di Bulan Oktober. Sementara pengumuman penilaian akhir diperkirakan di Bulan Desember Tahun 2024.

Indikator Kinerja IKSK.07.03 - Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Pelatihan KP (Nilai)

IKU Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Pelatihan KP merupakan indikator yang menunjukkan keselarasan antara dokumen Laporan Kinerja (LKJ), Target Kinerja dan Cara Pencapaian Kinerja dari masing-masing indikator yang diperjanjikan dalam PK.

IK Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Pelatihan KP tidak memiliki target pada rencana aksi triwulan III tahun 2024. Target IK ini diukur pada periode triwulan IV dengan target tahunan sebesar 94.

Penghitungan Nilai Rekonsiliasi Data Kinerja dilakukan pada 3 (tiga) aspek yaitu :

- 1) Aspek Kepatuhan (A-I) : Aspek kepatuhan dilakukan dengan melakukan penilaian pada ketersediaan dokumen yang dibutuhkan yang meliputi : PK, Manual IKU, Rincian Target IKU, Renaksi, LKJ/LCK TW I s.d III dan data dukung LKJ/LCK TW III.
- 2) Aspek Kesesuaian (A-II) : Aspek kesesuaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai kesesuaian dokumen pada kriteria kesesuaian target, kesesuaian realisasi dan kesesuaian informasi data.
- 3) Aspek Ketercapaian: Nilai Capaian Indikator Kinerja

Nilai Rekon Kinerja adalah skoring kertas kerja rekon yang merupakan tahap akhir dari penilaian rekonsiliasi data kinerja. Adapun progress kegiatan untuk IKU ini yang telah dilaksanakan sampai triwulan III adalah sebagai berikut:

- 1) Penyiapan Dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2024
- 2) Penyiapan Dokumen capaian realisasi kinerja Tahun 2024
- 3) Sinkronisasi Dokumen perencanaan dan realisasi kinerja pada aplikasi Kinerja KKP

Indikator Kinerja IKSK.07.04 - Persentase unit kerja Pusat Pelatihan KP yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%)

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Formula perhitungan IKU ini menggunakan aplikasi Collaboration Office Portal dengan alamat portal.kkp.go.id dengan penghitungan keaktifan dilakukan setiap satu triwulan dengan nilai 3 poin dan nilai maksimal 4 poin. Cara pengukuran menggunakan aplikasi Manajemen Pengetahuan dengan alamat portal.kkp.go.id (collaboration office) dan untuk triwulan III hasil capaiannya merupakan nilai rata-rata capaian pada triwulan I, II dan III.

Capaian dihitung dengan rumus:

Pemenuhan Dokumen :

$$\frac{\text{Jumlah Dokumen yang Diupload}}{\text{Jumlah Target Dokumen}} \times 20\%$$

Keaktifan :

$$\frac{\text{Jumlah Pejabat yang ikutserta/bergabung}}{\text{Jumlah Target Pejabat yang ikutserta/bergabung}} \times 80\%$$

Gambar 5. Formula perhitungan MP (Sumber : Dok Manual IKU)

Capaian IK Persentase unit kerja Puslat KP yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar Pada triwulan III berdasarkan surat penyampaian capaian IK MP TW III Nomor B.7516/BPPSDM.1/TU.210/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024 yakni 118,19% dari target triwulan III sebesar 94% (118,94%). Capaian triwulan III tahun 2024 ini mengalami peningkatan dibandingkan capaian di triwulan III tahun 2023 (100%). Di triwulan I tahun 2024 IK ini mengalami perubahan yakni perbedaan aplikasi yang dipergunakan oleh user yang sebelumnya menggunakan aplikasi Bitrix24.kkp menjadi aplikasi portal.kkp.go.id

Tabel 24. Capaian IKU Persentase unit kerja Puslat KP yang menerapkan manajemen pengetahuan yang tersandar

| Realisasi TW III Puslatluh KP | | | | 2024 | | | | | Renstra PUSLATLUH KP 2020 – 2024 | |
|-------------------------------|--------|-------|------|-------------|---------------|-----------|-----------|----------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Target 2024 | Target TW III | Realisasi | % Capaian | % Kenaikan 2023-2024 | Target 2024 | % Capaian thd target 2024 |
| | 100,00 | 50,00 | 100 | 94 | 94 | 111,80 | 118,94 | 111,80 | 94 | 118,94 |

Sumber : Data Capaian Pusat Pelatihan KP

Adapun faktor penyebab keberhasilan indikator kinerja Persentase unit kerja Puslat KP yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar triwulan III Tahun 2024 disebabkan oleh terpenuhinya variabel-variabel terhadap penilaian MP oleh pejabat pelaksana dengan kontribusi pengetahuan berupa informasi, infografis dan video di platform yang telah tersedia.

Kegiatan pendukung capaian Indikator Kinerja Persentase unit kerja Puslat KP yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar antara lain yakni sosialisasi secara berjenjang terhadap penggunaan portal collaboration office sebagai platform Manajemen Pengetahuan dan komitmen pimpinan dan para pejabat pelaksana terhadap pemenuhan capaian IK ini.

Indikator Kinerja IKSK.07.05 - Indeks Profesionalitas ASN Pusat Pelatihan KP (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN secara definisi adalah adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi meliputi (a) Kualifikasi, (b) Kompetensi; (c) Kinerja; dan (d) Disiplin. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi (a) Pendidikan S-3 (Strata-Tiga), (b) Pendidikan S-2 (Strata-Dua), (c) Pendidikan S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma-Empat), (d) Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga) / SM (Sarjana Muda), (e) Pendidikan D-1 (Diploma-Satu) /D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat; dan (f) Pendidikan di bawah SLTA dengan formula sebagai berikut:

Tabel 25. Bobot Komponen Kualifikasi Perhitungan MP

| Nilai | Nama Kualifikasi | Nilai Kualifikasi |
|-------|-----------------------|-------------------|
| 5 | Pendidikan S3 | 25 |
| 4 | Pendidikan S2 | 20 |
| 3 | Pendidikan S1 | 15 |
| 2 | Pendidikan DIII/SM | 10 |
| 1 | Pendidikan DII/DI/SMA | 5 |
| 0 | Pendidikan SMP/SD | 1 |

Sumber : Dok Manual IKU Pusat Pelatihan KP

Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/ Workshop/ Konferensi/Setara sejak 2 (dua) tahun terakhir, dengan formula sebagai berikut :

Tabel 26. Bobot Komponen Kompetensi Perhitungan MP

| Nilai | Nama Kompetensi | Nilai Kompetensi Sesuai Jabatan | | |
|----------|---|---------------------------------|--------------------|-----------------|
| | | Kompetensi Struktural | Kompetensi Jabfung | Kompetensi Staf |
| | Diklat Struktural | 15 | | |
| 1 | Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya | 15 | | |
| 0 | Tidak Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya | 0 | | |
| | Diklat Fungsional | | 15 | |
| 1 | Pernah Ikut Diklat Fungsional | | 15 | |
| 0 | Tidak Pernah Ikut Diklat Fungsional | | 0 | |
| | Diklat 20 JP | 15 | 15 | 22,5 |
| 1 | Pernah Ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir | 15 | 15 | 22,5 |
| 0 | Tidak Pernah ikut Diklat 20 JP dalam Tahun Terakhir | 0 | 0 | 0 |
| | Seminar | 10 | 10 | 17,5 |
| 1 | Pernah Ikut Seminar | 10 | 10 | 17,5 |
| 0 | Tidak Pernah Ikut Seminar | 0 | 0 | 0 |
| | Total Mengikuti Kompetensi | 40 | 40 | 40 |

Sumber : Dok Manual IKU Pusat Pelatihan KP

Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi : a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan b. Perilaku kerja, dengan formula sebagai berikut:

Tabel 27. Bobot Komponen Kinerja Perhitungan MP

| No | Keterangan Nilai SKP | Nilai SKP | Nilai Kinerja |
|----------|----------------------|----------------|---------------|
| 1 | Sangat Baik | 91 - keatas | 30 |
| 2 | Baik | 76 s.d 90 | 25 |
| 3 | Cukup | 61 s.d 75 | 15 |
| 4 | Kurang | 51 s.d 60 | 5 |
| 5 | Buruk | 50 s.d kebawah | 1 |

Sumber : Dok Manual IKU Pusat Pelatihan KP

Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami selama 5 tahun terakhir, yang meliputi : a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; dan b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat), dengan formula sebagai berikut:

Tabel 28. Bobot Komponen Disiplin Perhitungan MP

| Nilai | Nama Hukuman Disiplin | Nilai Disiplin |
|----------|--|----------------|
| 0 | Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin | 5 |
| R | Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Ringan | 3 |
| S | Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang | 2 |
| B | Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Berat | 1 |

Sumber : Dok Manual IKU Pusat Pelatihan KP

Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:

- Kualifikasi** dihitung dari kondisi tingkat pendidikan terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah diupdate pada aplikasi SIMPEG Online KKP.

- b. **Kompetensi** diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan (1) Perhitungan nilai Diklat Pim, Diklat Fungsiak/Teknis, Diklat 20 JP dan Seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya; (2) Pejabat Struktural wajib sudah melaksanakan Diklatpim, sesuai dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun dengan total bobot yaitu 40; (3) Pejabat Fungsional wajib sudah melaksanakan Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40; (4) Pejabat Fungsional Umum wajib sudah melaksanakan Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40;
- c. **Kinerja** diolah datanya dari aplikasi Penilaian Prestasi Kerja Online KKP atau data riwayat Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) pada aplikasi SIMPEG Online KKP dengan nilai Kinerja dari Kategori;
- d. **Disiplin** diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan diambil yang tidak pernah/ pernah dijatuhi hukuman disiplin selama 5 tahun terakhir dan diupdate pada aplikasi SIMPEG.

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas (a) Kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen); (b) Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen); (c) Kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan (d) Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen). Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 &IPASN = \text{Nilai Kualifikasi} + \text{Nilai Kompetensi} + \text{Nilai Kinerja} + \text{Nilai Disiplin} \\
 &IPLev 2 = \text{Rerata Nilai IPASN dari seluruh ASN lingkup Level 2} \\
 &IPLev 1 = \text{IPASN Pejabat Lev 1} + \text{Rerata Nilai IPLev 2}
 \end{aligned}$$

Gambar 6. Rumus Perhitungan IP ASN (Sumber : Manual IKU)

Adapun kategori penilaian IP ASN yakni:

Tabel 29. Kategori Nilai IP ASN

| Nilai | Kategori |
|----------|--|
| 91 - 100 | Sangat Profesional/sangat tinggi |
| 81 - 90 | Cenderung profesional/tinggi |
| 71 - 80 | Rentan tidak profesional/ sedang |
| 61 - 70 | Cenderung tidak profesional/ rendah |
| ≤60 | Sangat tidak profesional/sangat rendah |

Sumber : Dok Manual IKU Pusat Pelatihan KP

Capaian IK Indeks Profesionalitas ASN Puslat KP ini diukur di Triwulan II dan triwulan IV.

Indikator Kinerja IKSK.07.06 - Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Pusat Pelatihan KP (%)

Keuangan negara merupakan salah satu unsur pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan mempunyai manfaat yang sangat penting guna mewujudkan tujuan negara untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka dari pada itu, penting untuk menjaga pelaksanaan kegiatan dan anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku. Salah satu untuk menciptakan pengelolaan yang bersih adalah pemeriksaan rutin oleh BPK. Pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilakukan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

IKU ini adalah IKU yang mengukur komitmen pimpinan dalam percepatan penyelesaian temuan serta inisiasi kegiatan seperti Tindak Lanjut Temuan dengan melakukan pendampingan ke satuan kerja dan kegiatan tindak lanjut temuan yang diadakan secara regional dengan melibatkan tim Itjen.

IK Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Puslat KP tidak memiliki target pada rencana aksi triwulan III tahun 2024. Target IK ini diukur pada periode triwulan IV dengan target tahunan sebesar $\leq 0,5\%$. Berdasarkan nota dinas Inspektorat Jenderal Nomor 1705/ITJ.0/TU.140/X/2024 berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian IKU persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (tuntas) pada periode pengukuran hingga periode Triwulan III Tahun 2024 lingkup KKP sebesar 89,74% (tuntas 2074 dari 2311 rekomendasi). Realisasi tindak lanjut hasil pengawasan (tuntas) tersebut melampaui target yang ditetapkan di Triwulan III Tahun 2024 yaitu sebesar 80%. Angka capaian tindak lanjut hasil pengawasan Itjen dari masing-masing unit Eselon I sampai dengan Triwulan III Tahun 2024. Adapun Pusat Pelatihan KP tidak ditemukan adanya temuan oleh BPK-RI.

Indikator Kinerja IKSK.07.07 - Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Pusat Pelatihan KP (%)

IKU secara definisi adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2023 s.d. Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh unit Eselon I lingkup KKP. IKU ini yang mengukur komitmen pimpinan dalam percepatan penyelesaian temuan serta inisiasi kegiatan seperti Tindak Lanjut Temuan dengan melakukan pendampingan ke

satuan kerja dan kegiatan tindak lanjut temuan yang diadakan secara regional dengan melibatkan tim Itjen.

Capaian IK Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Pusat Pelatihan KP Pada Triwulan III Tahun 2024 mengacu kepada Surat a.n. Kepala BPPSDM, Sekretaris BPPSDM Nomor : B.7568/BPPSDM.1/HP.510/X/2024 perihal Capaian IKU “Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP” dan “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP” tanggal 14 Oktober 2024. Disampaikan bahwa Pusat Pelatihan KP tidak terdapat temuan awal (saran) atau 0, sehingga capaian IKUnya disesuaikan target yaitu 82% atau 100,00%.

Tabel 30. Capaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan

| Realisasi TW III Puslatluh KP | | | | 2024 | | | | | Renstra PUSLATLUH KP 2020 – 2024 | |
|-------------------------------|-------|------|------|-------------|---------------|-----------|-----------|----------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Target 2024 | Target TW III | Realisasi | % Capaian | % Kenaikan 2023-2024 | Target 2024 | % Capaian thd target 2024 |
| | 97,56 | 100 | 75 | 82 | 82 | 82 | 100 | 9,33 | 82 | 100 |

Sumber : Data Capaian Pusat Pelatihan KP

Realisasi capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP” periode Triwulan III Tahun 2024 diperoleh dari hasil tindak lanjut atas Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Itjen KKP yang diterbitkan pada periode Triwulan IV Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dengan tindak lanjut rekomendasi LHP yang berstatus tuntas.

Sebagaimana IK ini diterapkan diseluruh unit eselon II maka capaian kinerja Pusat Pelatihan KP dalam persentase rekomendasi hasil pengawasan Tahun 2024 dapat dibandingkan dengan unit Eselon II lainnya. Jika dibandingkan dengan capaian unit Eselon II lain lingkup BPPSDM KP, Pusat Penyuluhan KP dan Pusat Pelatihan KP memiliki nilai yang sama 82% dengan persentase capaian yang sama sebesar 100,00% karena tidak memiliki temuan.

Tabel 31. Perbandingan Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan (%) dengan Eselon II Lainnya

| | Sekretariat BPPSDM | Pusat Penyuluhan KP | Pusat Pendidikan KP | Pusat Pelatihan KP | BBRP2BKP | BBRSEKP |
|---------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------|---------|
| Temuan Awal | 70 | 0 | 9 | 0 | 2 | 7 |
| Tindak Lanjut | 61 | 0 | 9 | 0 | 2 | 7 |
| % | 87,14 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 |

Faktor yang mendukung tercapainya indikator kinerja ini antara lain terlaksananya administrasi keuangan dan perbendaharaan yang baik. Serta antisipasi permasalahan atau adanya kesalahan dalam administrasi. terselesaikannya dokumen tindaklanjut yang baik dengan koordinasi yang baik.

Kegiatan pendukung tercapainya indikator kinerja ini dipengaruhi oleh terselesaikannya tindaklanjut hasil pengawasan yang dikerjakan, komitmen pimpinan bersama tim keuangan maupun perbendaharaan dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran dalam proses administrasi keuangan.

Indikator Kinerja IKSK.07.08 - Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja Pusat Pelatihan KP (Inovasi)

IKU Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja Pusat Pelatihan KP merupakan strategi kebijakan BPPSDM KP untuk mendorong penciptaan inovasi pelayanan publik yang dilakukan oleh para penyelenggara pelayanan publik lingkup BPPSDM KP sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi. IKU ini dihadirkan dalam bentuk proposal inovasi pelayanan publik lingkup pelatihan KP. Adapun untuk kriteria inovasi yang diajukan wajib memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Memiliki Kebaruan, yaitu memperkenalkan cara, pendekatan atau kebijakan dan desain pelaksanaan baru dan berbeda dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik;
- 2) Efektif, yaitu menghasilkan keluaran yang nyata sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pelayanan publik;
- 3) Bermanfaat, yaitu memberikan dampak bagi peningkatan kualitas pelayanan publik;
- 4) Dapat Ditransfer/Direplikasi, yaitu mudah ditiru dan dikembangkan oleh penyelenggara Inovasi lainnya; dan
- 5) Berkelanjutan, yaitu terus diterapkan dan dikembangkan secara berkesinambungan, serta mendapat dukungan masyarakat.

IK Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja Pusat Pelatihan KP tidak memiliki target pada rencana aksi triwulan III tahun 2024. Target IK ini diukur pada periode triwulan IV dengan target tahunan sebesar 1 Inovasi.

Progress kegiatan yang telah dilaksanakan sampai triwulan III adalah penyampaian usulan proposal Inovasi Pelayanan Publik dari BPPP Medan ke Sekretariat BPPSDM KP untuk dilakukan penilaian awal terkait pelayanan pendaftaran peserta Pelatihan, Uji Kompetensi dan Penggunaan Sarana dan Prasarana secara online. Inovasi ini

merupakan pengembangan Website BPPP Medan yang semula diberi nama BOSS PTSP (BPPP Medan One Stop Service Pelayanan Terpadu Satu Pintu) menjadi SIAPP BOSS (Sarana Informasi Aksi Pelayanan Publik BPPP Medan One Stop Service). Sebagai informasi, pada update dan penambahan fitur terbaru kami akan meningkatkan keamanan data peserta dan masyarakat dengan menggunakan Payment Gateway.

Indikator Kinerja IKSK.07.09 – Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Pelatihan KP (Nilai)

Berdasarkan Peraturan Menteri KP No. 68 Tahun 2017 tentang SAKIP, tujuan pelaksanaan SAKIP adalah mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya baik dari sisi perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan disertai alat bukti. SAKIP membantu kita untuk memberikan pedoman proses/tahapan pencapaian tujuan organisasi yang valid, measurement, dan akuntable, serta memberikan informasi kepada kita posisi pencapaian kinerja yang telah dihasilkan. (apakah berhasil ataukah gagal).

Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, salah satu pengendalian dan fasilitasi dalam pengelolaan kinerja dalam adalah dalam bentuk Advisory Services (pendampingan dalam rangka perbaikan kinerja). Salah satu bentuk implemementasi di BPPSDM berupa inisiasi metode pendampingan evaluasi SAKIP mandiri dan rekon kinerja pada seluruh satker secara berjenjang yang dilakukan BPPSDM, mulai diadopsi untuk lingkup KKP. Begitupula evaluasi berbasis aplikasi menjadi nilai inovasi bagi sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan KKP, menjadikan BPPSDM mendapatkan nilai lebih dalam pengelolaan kinerja. IK Nilai PM SAKIP Pusat Pelatihan KP ini tidak memiliki target pada rencana aksi triwulan III tahun 2024.

IK Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Pelatihan KP tidak memiliki target pada rencana aksi triwulan III tahun 2024. Target IK ini diukur pada periode triwulan IV dengan target tahunan sebesar 81 (Nilai).

Progress kegiatan yang telah dilaksanakan sampai triwulan III adalah sebagai berikut:

- 1) Telah dilaksanakan Penilaian Mandiri SAKIP Level III Lingkup Pusat Pelatihan KP di Medan pada Juni 2024;
- 2) Penilaian PM SAKIP Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP dengan nilai sementara 83,60;

Akuntabilitas Keuangan

Dari sisi anggaran, Pusat Pelatihan KP dan UPT Pusat Pelatihan KP memiliki Pagu awal sebesar Rp. 431.422.576.000 dan pagu yang aktif sebesar Rp. 416.988.460.000. Berdasarkan data, sampai dengan Triwulan III Tahun 2024, realisasi keuangan Pusat Pelatihan KP dan UPT sebesar Rp. 297.111.541.836 atau sebesar 71,25% dari Pagu Aktif. Untuk Pusat Pelatihan KP sendiri memiliki pagu awal sebesar Rp.15.351.302.000 dan pagu aktif sebesar Rp. 13.301.302.000. Realisasi anggaran Pusat Pelatihan KP sebesar Rp. 9.736.860.166 yakni 73,20 % dari Pagu Aktif Pusat Pelatihan KP.

Tabel 32. Realisasi Keuangan Lingkup Pusat Pelatihan KP

| No | Unit Kerja | Pagu AWAL (Rp) | Blokir AA (Rp) | JUMLAH Pagu AKTIF (Rp) | Realisasi (Rp) | %-ase (dari pagu Aktif) |
|----|--------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| 1 | PUSAT PELATIHAN KP | 15.351.302.000 | 2.050.000.000 | 13.301.302.000 | 9.736.860.166 | 73,20% |
| 2 | BDA SUKAMANDI | 16.615.261.000 | 0 | 16.615.261.000 | 12.233.569.022 | 73,63% |
| 3 | BPPP MEDAN | 82.549.809.000 | 4.126.916.000 | 78.422.893.000 | 59.046.030.579 | 75,29% |
| 4 | BPPP TEGAL | 68.140.479.000 | 2.312.200.000 | 65.828.279.000 | 39.748.757.515 | 60,38% |
| 5 | BPPP BANYUWANGI | 119.221.972.000 | 2.779.200.000 | 116.442.772.000 | 83.728.250.936 | 71,91% |
| 6 | BPPP BITUNG | 62.753.210.000 | 0 | 62.753.210.000 | 46.694.781.177 | 74,41% |
| 7 | BPPP AMBON | 66.790.543.000 | 3.165.800.000 | 63.624.743.000 | 45.923.292.441 | 72,18% |
| | TOTAL | 431.422.576.000 | 14.434.116.000 | 416.988.460.000 | 297.111.541.836 | 71,25% |

Secara umum kinerja Pusat Pelatihan KP Tahun 2024 telah dilaksanakan dan capaian kinerja yang dihasil tercapai secara optimal. Namun demikian secara teknis masih tetap perlu dilakukan optimasi pelaksanaan kegiatan seperti:

- a) Disiplin dalam pelaksanaan kegiatan yang disesuaikan dengan rencana penarikan anggaran/rencana operasional kegiatan yang sudah disusun;
- b) Perencanaan yang cermat terkait jadwal kegiatan dan penggunaan anggaran, sehingga tidak terjadi deviasi yang tinggi antara rencana penggunaan anggaran dan realisasinya;
- c) Untuk penghematan anggaran, memantau dan memastikan bahwa target yang sudah ditetapkan dalam renja tetap sejalan

Tabel 33. Rincian Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Utama dan Pendukung IK Triwulan III Tahun 2024

| No | Indikator Kinerja | Target Tahunan | Target TW II | Capaian TW II | % | RO Pendukung | Pagu Anggaran (%) | Realisasi Anggaran |
|----|--|----------------|--------------|---------------|--------|--|-------------------|--------------------|
| 1 | Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri | 75 | 0 | 0 | - | 2375.SCC.001 Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih | 55.916.997.000 | 42.948.617.144 |
| 2 | Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih | 35.713 | 21.126 | 26.228 | 120,00 | | 55.916.997.000 | 42.948.617.144 |
| 3 | Nilai PNPB Satker Lingkup Pusat Pelatihan KP | 13 | 6 | 10 | 120,00 | | 55.916.997.000 | 42.948.617.144 |
| 4 | Tenaga kerja yang terlibat di Lingkup Puslat KP | 122 | 0 | 0 | - | | 55.916.997.000 | 42.948.617.144 |
| 5 | SDM KP yang bersertifikat kompetensi | 1.450 | 428 | 666 | 120,00 | 2375.DCC.001 Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi | 933.430.000 | 441.788.008 |
| 6 | Lulusan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) | 147 | 0 | 0 | - | 2375.ABW.002 Inovasi yang diterapkan untuk Pelatihan Kelautan dan Perikanan (Kaji Terap) | 300.000.000 | 1.740.000 |
| 7 | Materi Pelatihan berbasis Kaji Widya | 5 | 0 | 0 | - | | 300.000.000 | 1.740.000 |
| 8 | Norma, Standar, Prosedur dan Kreteria Pelatihan dan Sertifikasi yang disusun | 4 | 0 | 0 | - | 2375.AFA.001 Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Pelatihan dan Penyuluhan KP | 3.125.000.000 | 1.037.450.841 |
| 9 | Kelembagaan Pelatihan yang tersertifikasi sesuai standar lembaga pelatihan | 7 | 0 | 0 | - | | 3.125.000.000 | 1.037.450.841 |
| 10 | Persentase Usulan Sertifikasi Program Diklat Masyarakat Bidang Kelautan dan Perikanan yang disahkan sesuai dengan Peraturan yang berlaku | 75 | 0 | 0 | - | | 3.125.000.000 | 1.037.450.841 |
| 11 | Jejaring dan/atau kerjasama lingkup Pusat Pelatihan KP yang disepakati dan ditindaklanjuti | 12 | 8 | 9 | 112,50 | | 3.125.000.000 | 1.037.450.841 |
| 12 | Sarana pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya | 6 | 0 | 0 | - | 2375.RAL.001 Peralatan dan Mesin Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan | 4.332.511.000 | 2.875.333.137 |
| 13 | Prasarana pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya | 5 | 0 | 0 | - | 2375.RBQ.001 Gedung, Bangunan dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 4.990.607.000 | 792.147.700 |
| 14 | Aparatur KP yang dilatih | 5.165 | 2.920 | 3.404 | 116,58 | 4345.EBC.996 Aparatur Kelautan dan Perikanan yang kompeten | 5.500.000.000 | 4.270.697.378 |
| 15 | Akreditasi Lembaga Penyelenggara Diklat Aparatur | 1 | 0 | 0 | - | | 5.500.000.000 | 4.270.697.378 |
| 16 | Persentase partisipasi unit organisasi dalam rangka implementasi Corporate University di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan | 10 | 0 | 0 | - | | 5.500.000.000 | 4.270.697.378 |
| 17 | Lembaga/ Instansi yang memanfaatkan fungsi pelayanan Peningkatan Kompetensi ASN Kelautan dan Perikanan | 5 | 0 | 0 | - | | 5.500.000.000 | 4.270.697.378 |
| 18 | Persentase layanan dukungan manajemen internal Pusat Pelatihan KP | 100 | 50 | 55 | 110,00 | WA.2378 Dukman dan Operasional Lingkup Puslat KP | 9.371.683.000 | 7.911.525.661 |

| No | Indikator Kinerja | Target Tahunan | Target TW II | Capaian TW II | % | RO Pendukung | Pagu Anggaran (%) | Realisasi Anggaran |
|----|---|----------------|--------------|---------------|--------|--|-------------------|--------------------|
| 19 | Unit kerja lingkup Pusat Pelatihan KP yang lolos penilaian WBK, Tim Penilai Internal KKP | 1 | 0 | 0 | - | WA.2378 Perencanaan Monev Pelaporan | 303.900.000 | 192.534.333 |
| 20 | Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Pelatihan KP | 94 | 0 | 0 | - | WA.2378 Layanan Perencanaan dan Penganggaran Puslat KP | 624.900.000 | 447.662.103 |
| 21 | Persentase unit kerja Puslat KP yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar | 94 | 94 | 112 | 118,94 | WA.2378 Belanja Pegawai Lingkup Puslat KP | 261.827.473.000 | 200.110.455.707 |
| 22 | Indeks Profesionalitas ASN Puslat KP | 81 | 76 | 81 | 106,01 | WA.2378 Belanja Pegawai Lingkup Puslat KP | 261.827.473.000 | 200.110.455.707 |
| 23 | Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Puslat KP | ≤ 0,5 | 0 | 0 | - | WA.2378 Pelayanan Keuangan Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Puslat KP | 275.819.000 | 146.117.228 |
| 24 | Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Puslat KP | 82 | 82 | 82 | 100,00 | WA.2378 Pelayanan Keuangan Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Puslat KP | 275.819.000 | 146.117.228 |
| 25 | Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja Puslat KP | 1 | 0 | 0 | - | WA.2378 Pelayanan Tata Usaha dan Kerumahtanggaan Pelatihan dan Penyuluhan | 191.400.000 | 108.057.118 |
| 26 | Penilaian Mandiri SAKIP Puslat KP | 81 | 0 | 0 | - | WA.2378 Layanan Pemantauan dan Evaluasi Puslat KP | 303.900.000 | 192.534.333 |

Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumber Daya Pusat Pelatihan KP

Pusat Pelatihan KP sebagai organisasi sektor publik dituntut untuk memperhatikan value for money dalam menjalankan aktivitasnya. Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam arti mencapai tujuan dan sasaran (maximizing benefits and minimizing costs), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

Sumber daya ekonomi tidak hanya berupa sumber daya alam, tetapi juga sumber daya manusia, modal, serta wirausaha (entrepreneur). Alokasi sumber daya ekonomi berarti penentuan banyaknya jumlah sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan wirausaha yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang dan jasa. Manfaat mengetahui alokasi sumber daya ekonomi adalah menjadi bahan pertimbangan manusia dalam melakukan perencanaan kebijakan ekonomi terutama terkait penggunaan sumber daya alam. Modal berupa anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan untuk mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, disamping itu anggaran dipergunakan juga sebagai alat perencana untuk mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, disamping itu anggaran dipergunakan juga sebagai alat pengendalian untuk mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan.

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan, Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan merealisasikan penggunaan anggaran berdasarkan pagu yang telah ditetapkan. Efisiensi diperlukan dalam menggunakan anggaran yang ada dengan bijak untuk merealisasikan rencana kegiatan-kegiatan dalam rangka mewujudkan capaian kinerja yang maksimal. Dengan adanya angka efisiensi maka dapat ditelaah lebih lanjut apakah kinerja organisasi sudah efektif atau hanya pemborosan anggaran.

Sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga,

Pada peraturan yang sama juga dinyatakan bahwa batas maksimum nilai efisiensi adalah 20% dan batas minimum adalah -20%. Dengan asumsi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa semakin efisiensinya mendekati 20% maka kinerja kegiatan dan anggaran semakin baik, begitu pula sebaliknya.

Terdapat 4 (empat) alur tahapan untuk mencapai **efisiensi anggaran** pada Pusat Pelatihan KP yaitu;

1. **Perencanaan (Anggaran)**

Efisiensi anggaran dilakukan Pusat Pelatihan KP dalam beberapa dimensi, yaitu: **Dimensi efisiensi pertama** mengutamakan manfaat. Oleh karena itu dibuat inisiatif strategis berupa indikator outcome dan pengawalannya.

Dimensi efisiensi kedua menetapkan prioritas kegiatan. Pada tahun 2022 Pusat Pelatihan KP telah menetapkan kegiatan prioritas, yang pengawalannya dilakukan secara rutin (*weekly report*) dan berkala (pembahasan bulanan) untuk mendapatkan rekomendasi memadai serta melaksanakan kegiatan yg menggunakan blended dilaksanakan dengan online sehingga menghemat anggaran.

Dimensi efisiensi ketiga berupa melakukan Kerjasama dengan Instansi lain K/L, NGO, Pihak Swasta dalam menghemat penggunaan anggaran kegiatan pelatihan KP.

Dimensi efisiensi keempat berupa refofusing anggaran pada pemangkasan alokasi anggaran belanja modal, perjalanan dinas dan pertemuan. dialihkan kepada kegiatan yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Dukungan Pusat Pelatihan KP dalam pencapaian upaya dimaksud dengan melakukan reuiu penganggaran secara berjenjang yang melibatkan *stakeholder* meliputi reuiu anggaran tingkat Pusat Pelatihan KP, reuiu anggaran tingkat KKP (Itjen dan Setjen), dan reuiu K/L (DJA dan Bappenas).

2. **Pelaksanaan Kegiatan**

Strategi pelaksanaan kegiatan untuk meminimalkan serapan anggaran terutama untuk perjalanan dinas

- 1) Sinergitas pelaksanaan kegiatan antar satker dan pusat dalam satu rangkaian
- 2) Mengutamakan pertemuan di ruang rapat internal atau satker-satker Pusat Pelatihan KP
- 3) Mengutamakan kegiatan pelatihan dengan metode online
- 4) Sosialisasi dan pembinaan dilaksanakan secara digitalisasi melalui *video conference* dan *live streaming*
- 5) Melaksanakan kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja dengan atasan berbasis *Balance Score Card* dan SKP.

- 6) Mengadakan Pelatihan masyarakat dan aparatur dengan via Daring/online sehingga menghemat anggaran.
- 7) Penguatan SDM Pusat Pelatihan KP dan UPT dalam meningkatkan kompetensi dan skill nya

3. Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi

- 1) Melaksanakan pengawalan pengelolaan anggaran satker lingkup Pusat Pelatihan KP agar tepat penggunaan dan sesuai aturan perundang-undangan secara rutin dan berkala. Efisiensi pemantauan secara rutin dan berkala melalui aplikasi dan digitalisasi mempercepat dan mempermudah memperoleh informasi dan hasil pengukuran sehingga pimpinan mendapatkan gambaran kondisi pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran dan segera memberikan rekomendasi kebijakan bila diperlukan. Aplikasi yang dimanfaatkan untuk pengukuran kinerja yaitu SMART DJA Bappenas, OM SPAN DJPB Kemenkeu, E-Monev Bappenas, E-Dalwas KKP, Kinerjaku KKP, Simlat, e-pelaporan, serta Dashboard dan *Weekly Report* BPPSDM
- 2) Melaksanakan evaluasi dan pembahasan teknis dan manajerial program dan kegiatan Pusat Pelatihan KP dengan virtual. Hal tersebut memangkas perjalanan dinas dan pertemuan sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya yang signifikan
- 3) Membayarkan Tunjangan Kinerja Pegawai sebagai bentuk insentif atas kinerja/kontribusi yang diberikan pada organisasi, dibayarkan berdasarkan capaian kinerja dan progress kerja disamping presensi kehadiran.



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA



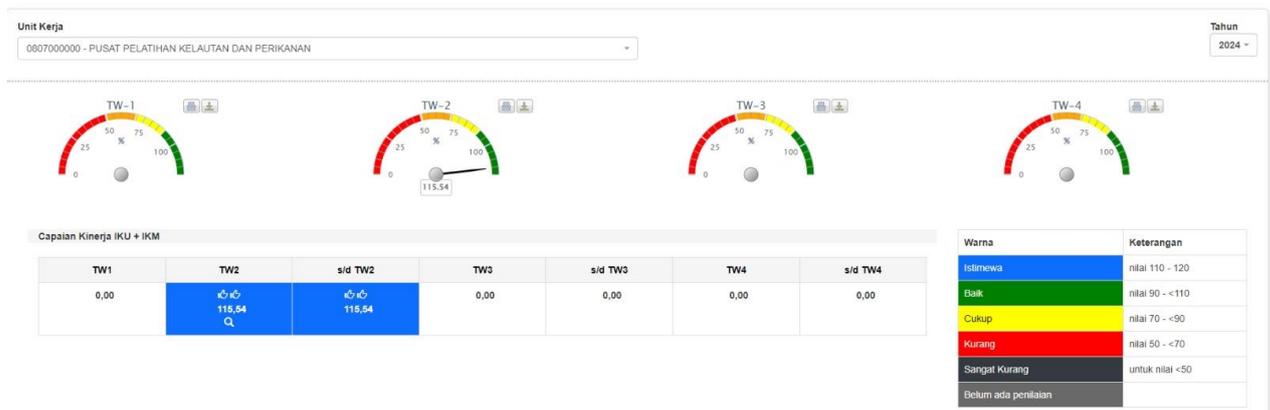
penutup



BAB IV - PENUTUP

Capaian Kinerja Utama

Pengukuran capaian kinerja Pusat Pelatihan KP triwulan II Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi IKU (*key performance indicator*, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balanced scorecard* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu Aplikasi Kinerjaku yang dapat diakses secara daring pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Capaian nilai kinerja Pusat Pelatihan KP pada Tahun 2024 adalah **115,54%** seperti pada tampilan grafik dashboard dibawah ini :



Adapun untuk Triwulan III, IK yang telah memiliki output capaian yakni :

- 1) **IKSK.01.02** - Capaian IKU jumlah masyarakat yang dilatih pada triwulan III tahun 2024 sebesar 35.148 orang atau sebesar 120% dari target triwulan III. Jika dibandingkan dengan target tahunannya telah mencapai 98,42%. Realisasi triwulan III tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 53,32% jika dibanding tahun 2023 di triwulan yang sama. Terhadap target Renstra Tahun 2024 capaian Triwulan III sebesar 98,42%. Berdasarkan target Jumlah Lulusan Pelatihan masyarakat yang dilatih pada masa periode Renstra 2020-2024 sebanyak 121.226 orang, realisasi sampai dengan Triwulan III tahun 2024 ini adalah sebanyak 125.919 orang atau mencapai 103,87%.
- 2) **IKSK.01.03** - Capaian IKU Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Pelatihan KP pada Triwulan III Tahun 2024 sebesar Rp.17.675.261.898,-. Atau 120% dari target Triwulan III sebesar Rp8.990.000.000,-. Jika dibandingkan dengan target tahunan sebesar Rp13.415.665.000,-. maka realisasi mencapai 131,78%. Jika dibandingkan dengan capaian Triwulan III pada tahun 2023 sebesar

Rp7.642.408.210,- ada kenaikan sebesar 131,32% dari Tahun 2023. Berdasarkan target kumulatif nilai PNBP Satker lingkup Pusat Pelatihan KP pada Renstra 2020-2024 sebesar 27,18 Milyar Rupiah, realisasi sampai dengan Triwulan III tahun 2024 ini adalah sebanyak 37,11 Milyar Rupiah (136,53%). Total Target Tahunan PNBP di lingkup Pusat pelatihan KP sebanyak Rp13.415.665.000,- pada triwulan III ini targetnya adalah Rp8.990.000.000,-. Realisasi Total Capaian triwulan III ini sebanyak Rp17.675.261.898,- atau mencapai 120%. Dari data tersebut, terlihat bahwa semua Satker telah mencapai target untuk triwulan III, menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam mencapai target PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). BPPP Tegal memiliki nilai target tahunan dan capaian triwulan III tertinggi di antara semua Satker, diikuti oleh BPPP Ambon dan BPPP Banyuwangi. Untuk target PNBP tahunan untuk semua BPPP telah terpenuhi di triwulan III.

- 3) **IKSK.02.01** - Capaian IKU SDM KP yang bersertifikat kompetensi pada triwulan III tahun 2024 sebesar 1299 orang atau sebesar 120% dari target triwulan III. Jika dibandingkan dengan target tahunannya telah mencapai 89,59%. Realisasi Triwulan III tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 23,36% jika dibanding tahun 2023 di triwulan yang sama. Berdasarkan target SDM KP yang bersertifikat kompetensi pada periode Renstra 2020-2024 sebanyak 4.308 orang, realisasi sampai dengan Triwulan 2 tahun 2024 ini adalah sebanyak 4.226 orang atau mencapai 98,09%. Berdasarkan bidang kompetensinya realisasi pada triwulan III ini Budidaya sebanyak 189 orang, Perikanan Tangkap sebanyak 1009 orang dan Manajemen sebanyak 42 orang. Sertifikasi Perikanan Tangkap ini sebagian besar merupakan sertifikasi untuk awak kapal perikanan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, baik dari DJPT ataupun dari BPPSDM pasca pelimpahan kewenangan terkait sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan.
- 4) **IKSK.04.04** - Pada triwulan III tahun 2024 ini capaian untuk jumlah jejaring dan/atau kerjasama Pusat Pelatihan KP sudah ada capaian 10 PKS dengan target triwulan III sebanyak 10 PKS (100%) dari target tahunan sebanyak 12 PKS (83,33%). Realisasi triwulan III tahun 2023 sebesar 16 kerjasama sehingga jika dibandingkan dengan tahun 2023 adanya penurunan sebesar 37,5%.
- 5) **IKSK.06.01** - Target kinerja triwulan III tahun 2024 ini sebanyak 4.300 orang, dan realisasi mencapai 5.120 orang (119,07%). Bila dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 5.165, realisasi sudah mencapai 99,13%. Jika dibandingkan

dengan capaian triwulan III tahun 2023 sebanyak 4.136 orang maka terjadi peningkatan sebanyak 23,79%. Apabila melihat target Renstra 2020-2024 kumulatif sebesar 22.690 orang, sampai triwulan II tahun 2024 ini sudah tercapai sebanyak 30.028 orang atau 132,34%.

- 6) **IKSK.07.01** - Capaian triwulan III Tahun 2024 sebesar 78,33% dari target triwulan III sebesar 75%. dibandingkan dengan tahun 2023 terjadi penurunan sedikit dari realisasi capaian sebesar 2,09%. Untuk bukti capaian IKU ini diperoleh Dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal satker antara lain Dokumen Perencanaan Anggaran 2025, dokumen revisi perencanaan anggaran 2024, dokumen perencanaan kinerja, dokumen reu renstra, dokumen laporan kinerja, dokumen laporan SPIP, dokumen realisasi anggaran, dokumen laporan PNBK, dokumen weekly report, laporan keuangan, laporan BMN, laporan PM SAKIP, dan laporan PIPK Tahun 2024.
- 7) **IKSK.07.04** - Capaian IK Persentase unit kerja Puslat KP yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar Pada triwulan III berdasarkan surat penyampaian capaian IK MP TW III Nomor B.7516/BPPSDM.1/TU.210/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024 yakni 118,19% dari target triwulan III sebesar 94% (118,94%). Capaian triwulan III tahun 2024 ini mengalami peningkatan dibandingkan capaian di triwulan III tahun 2023 (100%). Di triwulan I tahun 2024 IK ini mengalami perubahan yakni perbedaan aplikasi yang dipergunakan oleh user yang sebelumnya menggunakan aplikasi Bitrix24.kkp menjadi aplikasi portal.kkp.go.id.
- 8) **IKSK.07.07** - Capaian IK Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Pusat Pelatihan KP Pada Triwulan III Tahun 2024 mengacu kepada Surat a.n. Kepala BPPSDM, Sekretaris BPPSDM Nomor : B.7568/BPPSDM.1/HP.510/X/2024 perihal Capaian IKU “Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP” dan “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP” tanggal 14 Oktober 2024. Disampaikan bahwa Pusat Pelatihan KP tidak terdapat temuan awal (saran) atau 0, sehingga capaian IKUnya disesuaikan target yaitu 82% atau 100,00%.

Permasalahan dan Rekomendasi

Secara umum kinerja untuk triwulan III tahun 2024 ini Pusat Pelatihan KP telah mampu merealisasikan target kinerjanya, namun demikian masih terdapat beberapa IKU yang harus tetap dikawal hingga akhir tahun 2024.

Rekomendasi untuk meningkatkan capaian kinerja Pusat Pelatihan KP pada Triwulan mendatang, yaitu:

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala progress capaian IKU Pusat dan Satker.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kegiatan prioritas.



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA



lampiran

LAMPIRAN

PK Pusat Pelatihan KP April 2024



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAM www.kkp.go.id SUREL bersida@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 PUSAT PELATIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Lilly Aprilya Pregiwati**
Jabatan : **Plt. Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan**

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **I Nyoman Radiarta**
Jabatan : **Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 April 2024

Pihak Kedua

Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan


I Nyoman Radiarta

Pihak Pertama

Plt. Kepala Pusat Pelatihan
Kelautan dan Perikanan


Lilly Aprilya Pregiwati

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PUSAT PELATIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

| NO | SASARAN KEGIATAN PUSLATLUH | NO | IKU | TARGET 2024 |
|----|--|----|--|-------------|
| 1 | Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan | 1 | Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri (%) | 72 |
| | | 2 | Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih (orang) | 35.173 |
| | | 3 | Nilai PNBSP Satker Lingkup Pusat Pelatihan KP (Rupiah Milyar) | 13,416 |
| | | 4 | Tenaga kerja yang terlibat di Lingkup Puslat KP (orang) | 122 |
| 2 | Terselenggaranya Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan | 5 | SDM KP yang bersertifikat kompetensi (orang) | 1.450 |
| 3 | Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan KP | 6 | Lulusan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) (orang) | 147 |
| | | 7 | Materi Pelatihan berbasis Kaji Widya (paket) | 5 |
| 4 | Tersedianya Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pelatihan dan Penyuluhan KP | 8 | Norma, Standar, Prosedur dan Kreteria Pelatihan dan Sertifikasi yang disusun (NSPK) | 4 |
| | | 9 | Kelembagaan Pelatihan yang tersertifikasi sesuai standar lembaga pelatihan (Lembaga) | 7 |
| | | 10 | Persentase Usulan Sertifikasi Program Diklat Masyarakat Bidang Kelautan dan Perikanan yang disahkan sesuai dengan Peraturan yang berlaku (%) | 75 |
| | | 11 | Jejaring dan/atau kerjasama lingkup Pusat Pelatihan KP yang disepakati dan ditindaklanjuti (Dokumen) | 12 |
| 5 | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan | 12 | Sarana Pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya (unit) | 6 |

| NO | SASARAN KEGIATAN PUSLATLUH | NO | IKU | TARGET 2024 |
|----|---|----|--|-------------|
| | dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan | 13 | Prasarana Pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya (unit) | 5 |
| 6 | Aparatur Yang Dididik dan Dilatih | 14 | Aparatur KP yang dilatih (orang) | 5.165 |
| | | 15 | Akreditasi Lembaga Penyelenggara Diklat Aparatur (Lembaga) | 1 |
| | | 16 | Persentase partisipasi unit organisasi dalam rangka implementasi Corporate University di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (%) | 10 |
| | | 17 | Lembaga/ Instansi yang memanfaatkan fungsi pelayanan Peningkatan Kompetensi ASN Kelautan dan Perikanan (Lembaga) | 5 |
| 7 | Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker | 18 | Persentase layanan dukungan manajemen internal Pusat Pelatihan KP (%) | 100 |
| | | 19 | Unit kerja lingkup Pusat Pelatihan KP yang lolos penilaian WBK, Tim Penilai Internal KKP (Satker) | 1 |
| | | 20 | Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Pelatihan KP (Nilai) | 94 |
| | | 21 | Persentase unit kerja Pusat Pelatihan KP yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%) | 94 |
| | | 22 | Indeks Profesionalitas ASN Pusat Pelatihan KP (indeks) | 81 |
| | | 23 | Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Pusat Pelatihan KP (%) | ≤ 0,5 |
| | | 24 | Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Pusat Pelatihan KP (%) | 82 |
| | | 25 | Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja Pusat Pelatihan KP (Inovasi) | 1 |
| | | 26 | Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Pelatihan KP (Nilai) | 81 |

Data Anggaran

| No | Kegiatan | Anggaran |
|---|---|---------------------------|
| 1 | Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan KP | Rp 74.124.614.000 |
| 2 | Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur KP | Rp 5.500.000.000 |
| 3 | Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPSDM | Rp 299.160.882.000 |
| Total Anggaran Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP | | Rp 378.785.496.000 |

Pihak Kedua
Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan



I Nyoman Radarta

Jakarta, 2 April 2024
Pihak Pertama
Plt. Kepala Pusat Pelatihan KP



Lilly Aprilya Pregiwati

Tabel 34. Link Data Dukung Capaian IK

| No. | Kode | Link Data Dukung |
|-----|------------|---|
| 1 | IKSK.01.02 | https://kinerjaku.kkp.go.id/app/assets/upld/2024/9202424831728618023.pdf https://kinerjaku.kkp.go.id/app/assets/upld/2024/9202424831728618041.xlsx https://kinerjaku.kkp.go.id/app/assets/upld/2024/9202424831728959736.pdf |
| 2 | IKSK.01.03 | https://kinerjaku.kkp.go.id/app/assets/upld/2024/9202424831728618301.pdf https://kinerjaku.kkp.go.id/app/assets/upld/2024/9202424831728618261.pdf |
| 3 | IKSK.02.01 | https://kinerjaku.kkp.go.id/app/assets/upld/2024/9202424831728618076.pdf https://kinerjaku.kkp.go.id/app/assets/upld/2024/9202424831728618128.xlsx https://kinerjaku.kkp.go.id/app/assets/upld/2024/9202424831728959754.pdf |
| 4 | IKSK.04.04 | https://kinerjaku.kkp.go.id/app/assets/upld/2024/9202424831728618468.pdf |
| 5 | IKSK.06.01 | https://kinerjaku.kkp.go.id/app/assets/upld/2024/9202424831728618174.pdf https://kinerjaku.kkp.go.id/app/assets/upld/2024/9202424831728618211.xlsx https://kinerjaku.kkp.go.id/app/assets/upld/2024/9202424831728959780.pdf |
| 6 | IKSK.07.01 | https://kinerjaku.kkp.go.id/app/assets/upld/2024/9202424831728618597.xlsx |
| 7 | IKSK.07.04 | https://kinerjaku.kkp.go.id/app/assets/upld/2024/9202424831728874678.pdf |
| 8 | IKSK.07.07 | https://kinerjaku.kkp.go.id/app/assets/upld/2024/9202424831729039003.pdf |